

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Badan Pusat Statistik mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 Mei 2013

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc

NIP. 19560805 197903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Indeks Tabel	vi
Indeks Grafik	viii
Indeks Singkatan	ix
Indeks CALK LRA	x
Indeks CALK Neraca	xi
Pernyataan Tanggung Jawab	xii
Pernyataan Telah Direviu	xiii
I. Ringkasan	1
II. LRA Perbandingan TA 2012 dan TA 2011	3
III. Neraca Perbandingan Per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011	4
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1 Dasar Hukum	6
A.2 Kebijakan Teknis Badan Pusat Statistik	8
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.4 Kebijakan Akuntansi	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah	19
B.2 Belanja Negara	25
B.3 Catatan Penting Lainnya	31
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	58
C.1 Aset	58
C.2 Kewajiban	80
C.3 Ekuitas Dana	81
D. Pengungkapan Penting Lainnya	83
D.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	83
D.2 Informasi Pendapatan dan Belanja Aktual	83

D.2 Rekening BPS	83
D.3. Pengungkapan Lain – lain	83

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER- 55 /PB/2012

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca Percobaan

Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

INDEKS TABEL

	Halaman
1. Ringkasan LRA TA 2012 dan 2011	1
2. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011	2
3. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	11
4. Rincian Jumlah Satker UAKPA	12
5. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB	13
6. Penggolongan Kualitas Piutang	18
7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012	19
8. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2012 dan 2011	21
9. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2012	25
10. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2012	26
11. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2012 dan 2011	26
12. Rincian Anggaran dan Belanja TA 2012	27
13. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011	27
14. Rincian Anggaran dan Belanja Pegawai TA 2012	28
15. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan 2011	29
16. Rincian Anggaran dan Belanja Barang TA 2012	29
17. Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan 2011	30
18. Rincian Anggaran dan Belanja Modal TA 2012	31
19. Perbandingan Belanja Modal TA 2012 dan 2011	31
20. Rincian Realisasi dan Sisa Dana HLLN dan PLN yang sudah SPHL	33
21. Rincian Realisasi Tunjangan Kinerja Pegawai BPS Pusat dan Daerah TA 2012	57
22. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Wilayah	58
23. Rincian Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per Wilayah	59
24. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Wilayah	60
25. Rincian Penyetoran Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Per Wilayah	60

26.Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Wilayah	61
27.Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	62
28.Rincian Piutang Bukan Pajak Per Wilayah	63
29.Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per Wilayah	63
30.Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah	64
31.Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah	65
32.Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>) Per Wilayah	67
33.Rincian Persediaan	68
34.Rincian Aset Tetap	68
35.Perbandingan Aset Tetap Antara Neraca dan SIMAK BMN Per 31 Desember 2012	69
36.Rincian Aset Tetap Lainnya	74
37.Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Wilayah	76
38.Rincian Tagihan TP/TGR Per Wilayah	77
39.Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR Per Wilayah	78
40.Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Wilayah	80
41. Rincian Cadangan Piutang per Wilayah	81
42.Rincian Ekuitas Dana Lancar Lainnya Per Wilayah	82
43.Rincian Satker Baru Selama 2012	84

INDEKS GRAFIK

	Halaman
1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 dan 2011	20
2. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2012 dan 2011	22
3. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012	27

INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

INDEKS CaLK LRA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah	
Catatan B.1 Pendapatan Negara dan Hibah	19
Catatan B.1.1 Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	22
B.1.2 Pendapatan Jasa	23
B.1.3 Pendapatan Bunga	23
B.1.4 Pendapatan Pendidikan	23
B.1.5 Pendapatan Iuran dan Denda	24
B.1.6 Pendapatan Lain – Lain	24
Belanja Negara	
Catatan B.2 Belanja Negara	25
Catatan B.2.1 Belanja Pegawai	28
Catatan B.2.2 Belanja Barang	29
Catatan B.2.3 Belanja Modal	30
B.3 Catatan Penting Lainnya	31

INDEKS CaLK NERACA

NERACA	Halaman
C.1.1 Aset Lancar	
Catatan C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	58
Catatan C.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	59
Catatan C.1.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	60
Catatan C.1.1.4 Piutang Bukan Pajak	62
Catatan C.1.1.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	63
Catatan C.1.1.6 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	64
Catatan C.1.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	65
Catatan C.1.1.8 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	66
Catatan C.1.1.9 Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>)	67
Catatan C.1.1.10 Persediaan	67
C.1.2 Aset Tetap	
Catatan C.1.2.1 Tanah	69
Catatan C.1.2.2 Peralatan dan Mesin	70
Catatan C.1.2.3 Gedung dan Bangunan	71
Catatan C.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	72
Catatan C.1.2.5 Aset Tetap Lainnya	73
Catatan C.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	75
C.1.3 Piutang Jangka Panjang	
Catatan C.1.3.1 Tagihan TP / TGR	76
Catatan C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR	78
C.1.4 Aset Lainnya	
Catatan C.1.4.1 Aset Tak berwujud	78
Catatan C.1.4.2 Aset Lain-lain	79
C.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	80
Catatan C.2.1.2 Uang Muka dari KPPN	81
Catatan C.2.1.3 Pendapatan yang ditangguhkan	81
C.3.1 Ekuitas Dana Lancar	
Catatan C.3.1.1 Cadangan Piutang	81
Catatan C.3.1.2 Cadangan Persediaan	81
Catatan C.3.1.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pdk	82
Catatan C.3.1.4 Ekuitas Dana Lancar Lainnya	82
Catatan C.3.1.5 Barang/Jasa yang Harus Diterima	82
C.3.2 Ekuitas Dana Investasi	
Catatan C.3.2.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	82
Catatan C.3.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	82
D Pengungkapan Penting Lainnya	
D.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	83
D.2 Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual	83
D.3 Rekening BPS	83
D.4 Pengungkapan Lain-lain	83



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No.6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2013

Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Suryamin, M.Sc
NIP. 19560805 197903 1 001



BADAN PUSAT STATISTIK

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2012

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik untuk tahun anggaran 2012 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Badan Pusat Statistik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 22 Februari 2013

Inspektur Utama,



Drs. Rusman Desiar, M.Si L
NIP. 19541215 197703 1 003

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar Rp69.438.553.639 atau mencapai 220,97 persen dari estimasi pendapatan serta Penerimaan Hibah yang sebesar Rp31.424.126.356.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp2.654.700.228.593 atau mencapai 92,94 persen dari alokasi anggaran yang sebesar Rp2.856.342.913.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
TA 2012 dan 2011

Uraian Sumber Dana	TA 2012			TA 2011
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Negara dan Hibah	31.424.126.356	69.438.553.639	220,97	43.447.748.818
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	31.424.126.356	69.438.553.639	220,97	43.447.748.818
Belanja Negara	2.856.342.913.000	2.654.700.228.593	92,94	2.482.240.666.993
Jumlah Belanja Negara	2.856.342.913.000	2.654.700.228.593	92,94	2.482.240.666.993

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2012 dan 2011.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp2.979.121.779.824 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp22.157.341.422, Aset Tetap sebesar Rp2.744.090.977.197, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp20.936.876, dan Aset Lainnya sebesar Rp212.852.524.329.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp4.333.365.219 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp2.974.788.414.605 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp17.823.976.203 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp2.956.964.438.402.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011

Uraian	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			(Rp)	%
Aset	2.979.121.779.824	2.600.873.981.043	378.247.798.781	14,54
Aset Lancar	22.157.341.422	26.315.446.803	(4.158.105.381)	(15,80)
Aset Tetap	2.744.090.977.197	2.476.962.548.621	267.128.428.576	10,78
Piutang Jangka Panjang	20.936.876	124.877.415	(103.940.539)	(83,23)
Aset Lainnya	212.852.524.329	97.471.108.204	115.381.416.125	118,37
Kewajiban	4.333.365.219	8.604.898.343	(4.271.533.124)	(49,64)
Kewajiban Jangka Pendek	4.333.365.219	8.604.898.343	(4.271.533.124)	(49,64)
Ekuitas Dana	2.974.788.414.605	2.592.269.082.700	382.519.331.905	14,76
Ekuitas Dana Lancar	17.823.976.203	17.710.548.460	113.427.743	0,64
Ekuitas Dana Investasi	2.956.964.438.402	2.574.558.534.240	382.405.904.162	14,85

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

BADAN PUSAT STATISTIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	TA 2012		TA 2011	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
A.I Pendapatan Negara					
A.I.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak					
A.I.1.a Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	B.1.1	2.598.707.356	8.941.594.401	344,08	8.434.375.347
A.I.1.b Pendapatan Jasa	B.1.2	25.223.073.000	52.144.902.749	206,73	26.032.137.051
A.I.1.c Pendapatan Bunga	B.1.3	0	23.116	0	16.357
A.I.1.d Pendapatan Pendidikan	B.1.4	3.600.750.000	6.469.200.000	179,66	6.957.100.000
A.I.1.e Pendapatan Iuran dan Denda	B.1.5	0	464.823.481	0	148.576.463
A.I.1.f Pendapatan Lain - Lain	B.1.6	1.596.000	1.418.009.892	88.847,74	1.875.543.600
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak		31.424.126.356	69.438.553.639	220,97	43.447.748.818
Jumlah Pendapatan Negara		31.424.126.356	69.438.553.639	220,97	43.447.748.818
A.II Hibah		0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		31.424.126.356	69.438.553.639	220,97	43.447.748.818
B. Belanja Negara					
B.1 Belanja Pegawai	B.2.1	1.291.587.250.000	1.257.261.701.512	97,34	674.851.220.122
B.2 Belanja Barang	B.2.2	1.124.192.962.000	973.857.023.405	86,63	1.468.004.025.014
B.3. Belanja Modal	B.2.3	440.562.701.000	423.581.503.676	96,15	339.385.421.857
Jumlah Belanja Negara		2.856.342.913.000	2.654.700.228.593	92,94	2.482.240.666.993

Jakarta, Mei 2013

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK



DR. SURYAMIN, M.Sc
 NIP. 19560805 197903 1 001

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

**BADAN PUSAT STATISTIK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2012	2011
Aset			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.1	240.116.614	986.006.527
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.1.2	4.268.005	49.152
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.3	2.982.000.066	6.110.643.451
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.4	89.793.732	167.452.574
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.1.5	(448.968)	(837.263)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>		<i>89.344.764</i>	<i>166.615.311</i>
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR	C.1.1.6	16.452.257.474	362.276.673
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.1.7	(16.190.794.280)	(80.644.009)
<i>Bagian Lancar Tagihan TP / TGR (Netto)</i>		<i>261.463.194</i>	<i>281.632.664</i>
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.1.8	322.971.666	380.530.268
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.1.1.9	-	96.420.621
Persediaan	C.1.1.10	18.257.177.113	18.293.548.809
Jumlah Aset Lancar		22.157.341.422	26.315.446.803
Aset Tetap			
Tanah	C.1.2.1	607.568.536.649	538.270.175.770
Peralatan dan Mesin	C.1.2.2	880.035.421.039	781.344.735.333
Gedung dan Bangunan	C.1.2.3	1.161.270.740.143	1.083.370.186.839
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.1.2.4	19.663.199.850	17.646.163.934
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.5	28.465.852.027	24.172.331.665
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.2.6	47.087.227.489	32.158.955.080
Jumlah Aset Tetap		2.744.090.977.197	2.476.962.548.621
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan TP/TGR	C.1.3.1	25.907.973	149.631.949
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.1.3.2	(4.971.097)	(24.754.534)
<i>Tagihan Tuntutan TP/TGR (Netto)</i>		<i>20.936.876</i>	<i>124.877.415</i>
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		20.936.876	124.877.415
Aset Lainnya			
Aset tak Berwujud	C.1.4.1	179.365.871.843	62.265.274.936
Aset Lain-lain	C.1.4.2	33.486.652.486	35.205.833.268
Jumlah Aset Lainnya		212.852.524.329	97.471.108.204
Jumlah Aset		2.979.121.779.824	2.600.873.981.043
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Pada Pihak Ketiga	C.2.1.1	3.721.781.542	2.774.401.823
Uang Muka dari KPPN	C.2.1.2	240.116.614	986.006.527
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.1.3	371.467.063	4.844.489.993
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.333.365.219	8.604.898.343
Ekuitas			
Ekuitas Dana Lancar			
Cadangan Piutang	C.3.1.1	350.807.958	448.247.975
Cadangan Persediaan	C.3.1.2	18.257.177.113	18.293.548.809
Dana yg Hrs disediakan utk Pmbyrn UJ Pendek	C.3.1.3	(1.554.466.289)	(2.588.453.080)
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.3.1.4	447.485.755	1.080.253.867
Barang/Jasa yg Hrs Diterima	C.3.1.5	322.971.666	476.950.889
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		17.823.976.203	17.710.548.460
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.3.2.1	2.744.090.977.197	2.476.962.548.621
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.3.2.2	212.873.461.205	97.595.985.619

Uraian	Ref	2012	2011
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		2.956.964.438.402	2.574.558.534.240
Jumlah Ekuitas Dana		2.974.788.414.605	2.592.269.082.700
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		2.979.121.779.824	2.600.873.981.043

Jakarta, Mei 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK



DR. SURYAMIN, M.Sc.
NIP. 195608051979031001

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor-229/KMK.6/2012 tentang Perubahan dan Penambahan atas Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
21. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran.
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012;
28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK

RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014 menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah wajib melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang akan digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dengan menyusun visi dan misi Kementerian/Lembaga yang diselaraskan dengan visi dan misi RPJM 2010-2014. Dengan adanya Renstra sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan Kementerian/Lembaga maka pelaksanaan program dan kegiatan akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data dan informasi statistik yang berkualitas dan bahan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan, dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2010-2014 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Renstra BPS dimaksudkan untuk menjadi:

1. Acuan bagi seluruh aparat BPS untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan jangka panjang BPS, sekaligus mencapai tujuan pemerintah dalam lima tahun ke depan.
2. Dasar bagi BPS dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral oleh lembaga pemerintah lain, dan penyelenggaraan statistik khusus oleh lembaga non-pemerintah.
3. Sumber informasi bagi para pengguna data dan *stakeholders*, baik di pusat maupun daerah, tentang kegiatan BPS dalam periode 2010-2014.

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS : **“Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”**,

Misi BPS :

- a. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien.
- b. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia.
- c. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak.

- e. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

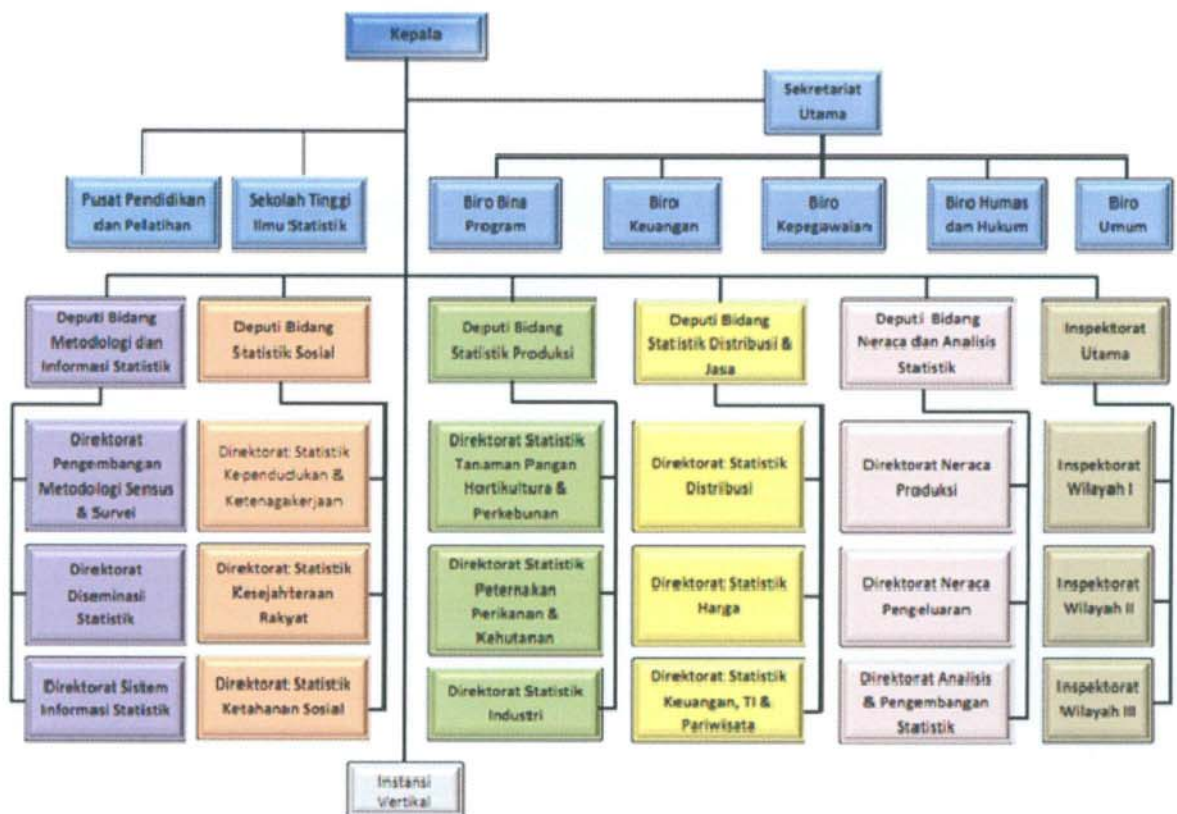
Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

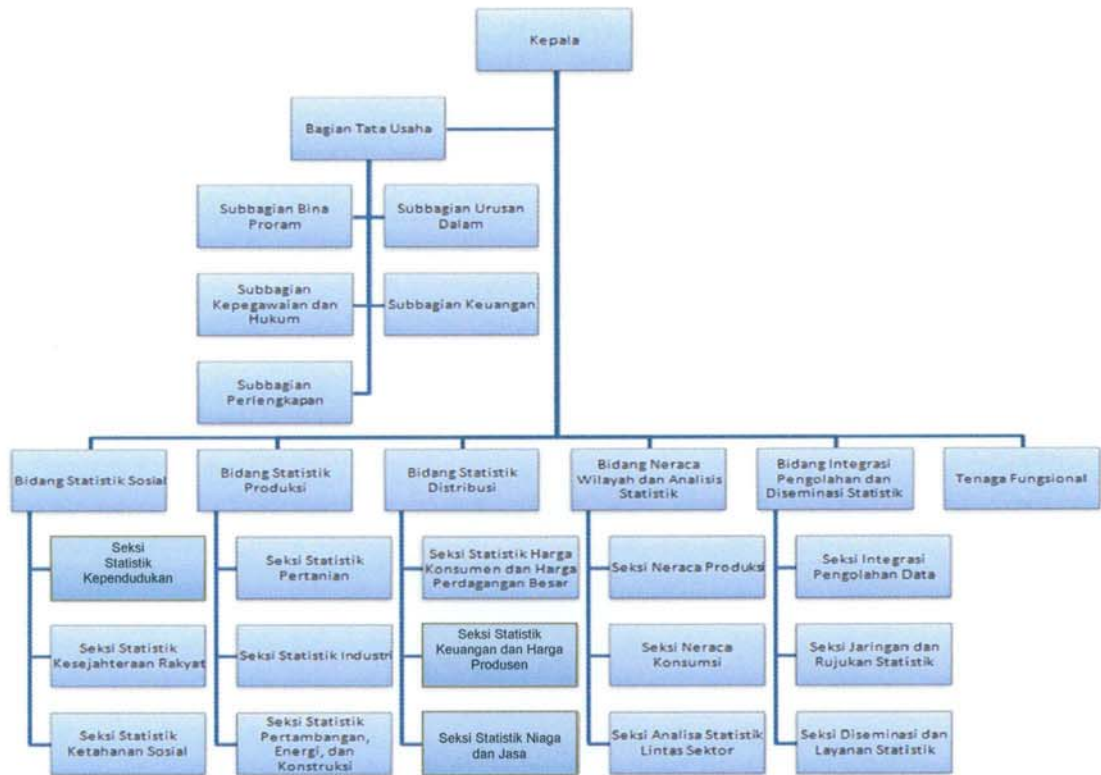
Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah.

Organisasi dan tata kerja BPS diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja BPS (Pusat) dan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

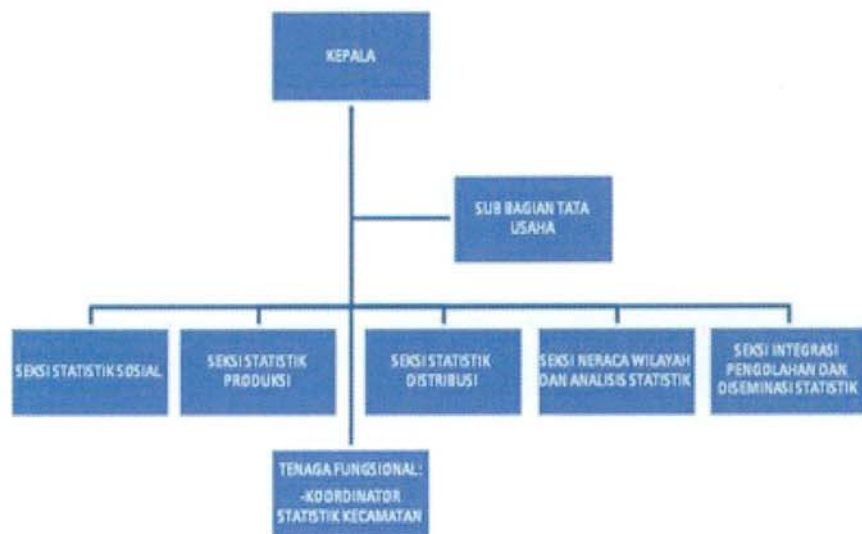
Gambar 1
Struktur Organisasi BPS Pusat



Gambar 2
Struktur Organisasi BPS Provinsi



Gambar 3
Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota



A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Tahun 2012 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan BPS Tahun 2012 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BPS yaitu wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 507 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 507 satker. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	054	Badan Pusat Statistik	1	-	506	-	-	-	-	-	-	507
Jumlah			1	-	506	-	-	-	-	-	-	507

Keterangan :

M = Menyampaikan LK

TM = Tidak Menyampaikan LK

Untuk tahun 2012, satuan kerja yang dicakup dalam laporan keuangan BPS meliputi 507 satuan kerja yang berada dalam satu eselon I yang terdiri dari 1 satker pusat, dan 506 satker provinsi dan kabupaten/kota dengan rincian Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Wilayah	BPS Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	BPS Pusat	1
2	0600	Aceh	24
3	0700	Sumatera Utara	30
4	0800	Sumatera Barat	20
5	0900	Riau	13
6	3200	Kepulauan Riau	8
7	1000	Jambi	12
8	1100	Sumatera Selatan	16
9	2600	Bengkulu	11
10	1200	Lampung	14
11	3000	Bangka Belitung	8
12	0200	Jawa Barat	27
13	0100	DKI Jakarta	7
14	0300	Jawa Tengah	36
15	0400	DI Yogyakarta	6
16	0500	Jawa Timur	39
17	2900	Banten	9
18	2200	Bali	10
19	2300	Nusa Tenggara Barat	11
20	2400	Nusa Tenggara Timur	20
21	1300	Kalimantan Barat	15
22	1400	Kalimantan Tengah	15
23	1500	Kalimantan Selatan	14
24	1600	Kalimantan Timur	15
25	1700	Sulawesi Utara	12
26	1800	Sulawesi Tengah	12
27	1900	Sulawesi Selatan	25
28	3400	Sulawesi Barat	6
29	2000	Sulawesi Tenggara	13
30	3100	Gorontalo	7
31	2100	Maluku	11
32	2800	Maluku Utara	9
33	2500	Papua	21
34	3300	Papua Barat	10
Total Satuan Kerja			507

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Data BMN yang disajikan dalam Neraca ini seluruhnya telah diproses melalui SIMAK-BMN.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 507 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 507 satker. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	054	Badan Pusat Statistik	1	-	506	-	-	-	-	-	-	507
Jumlah			1	-	506	-	-	-	-	-	-	507

Keterangan :

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Barang

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, piutang, dan persediaan.

Kas dan setara kas disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dan setara kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian negara/lembaga dan/atau hak kementerian negara/lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang dinyatakan dalam Neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang dalam neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Sehingga diperlukan penyesuaian nilai piutang berdasarkan kualitas atau tingkat resiko ketidaktertagihannya dengan cara membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan kualitas piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang berdasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga bahwa pencatatan piutang hanya dilakukan pada saat pencatatan saldo awal piutang pertama kali dan penambahan atau pengurangan nilai piutang pada akhir semester. Pada akhir tahun, Tagihan TGR diklasifikasikan dalam Bagian Lancar TGR (Aset Lancar) dan Tagihan TGR (piutang jangka panjang). Kemudian, pada awal tahun Bagian Lancar TGR direklasifikasikan kembali pada akun Tagihan TGR (piutang jangka panjang).

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada Neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan bilamana persediaan dalam kondisi rusak maka cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dilaporkan pada Neraca BPS per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007, pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin ditetapkan kembali dalam PMK 171/PMK.05/2008, dengan uraian sebagai berikut:

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pedoman kapitalisasi dan penilaian Barang Milik Negara (BMN). Peralatan dan Mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000 tidak dikapitalisasi. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara.

TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai piutang jangka panjang.

Aset lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah dampak yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban BPS yang dilaporkan dalam Neraca adalah Kewajiban Jangka Pendek. Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek yang meliputi:

a. Utang pada Pihak Ketiga

Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Kewajiban ini dapat berupa belanja yang masih harus dibayar.

b. Uang Muka dari KPPN

Akun Uang Muka dari KPPN merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

c. Pendapatan yang ditangguhkan

Merupakan akun kontra Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari bunga/jasa giro rekening bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal Neraca dan Pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Negara.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

Penyusutan Aset
Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Sampai saat penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Badan Pusat Statistik belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp69.438.553.639**

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Badan Pusat Statistik pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp69.438.553.639 atau mencapai 220,97 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp31.424.126.356 yang seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Pendapatan PNBP Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012

Kode	Uraian	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	31.424.126.356	69.438.553.639	220,97
423	Pendapatan PNBP Lainnya	31.424.126.356	69.438.553.639	220,97
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dan Penjualan	2.598.707.356	8.941.594.401	344,08
4232	Pendapatan Jasa	25.223.073.000	52.144.902.749	206,73
4233	Pendapatan Bunga	-	23.116	-
4235	Pendapatan Pendidikan	3.600.750.000	6.469.200.000	179,66
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	-	464.823.481	-
4239	Pendapatan Lain-lain	1.596.000	1.418.009.892	88.847,74
	Jumlah	31.424.126.356	69.438.553.639	220,97

Jumlah realisasi pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2012 yang tersaji dalam tabel merupakan nilai netto sebesar Rp69.438.553.639 setelah dikurangi dengan pengembalian realisasi pendapatan yang bernilai Rp0.

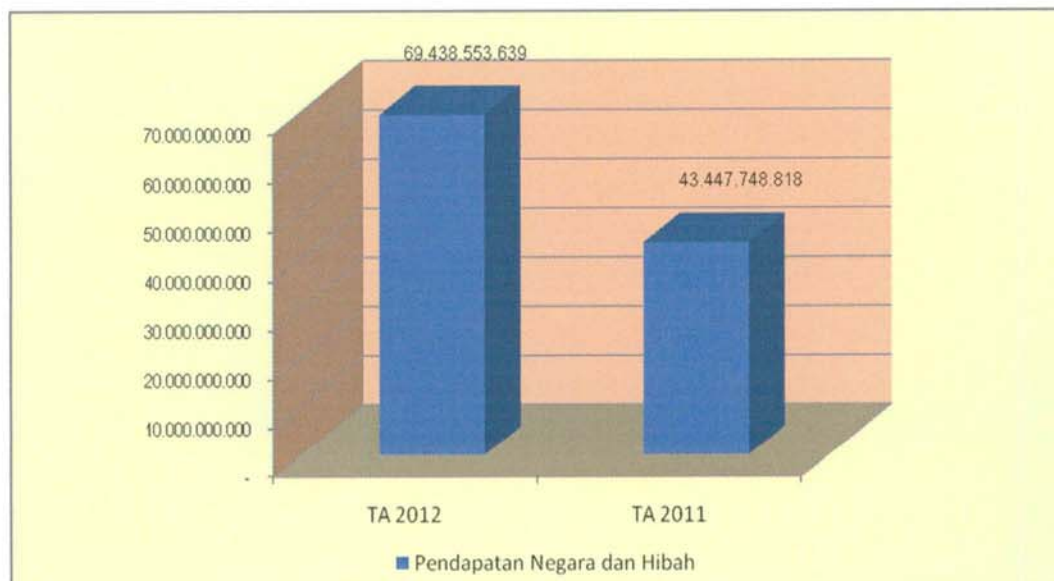
Penjelasan realisasi PNBP untuk masing-masing uraian sebagai berikut:

- Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dan Penjualan diperoleh dari pendapatan penjualan data statistik, buku-buku publikasi, penjualan dokumen pelelangan, penjualan lainnya, penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah, penjualan kendaraan bermotor, penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan, sewa rumah dinas, sewa gedung, bangunan dan gudang (sewa ruang kantor oleh BRI, sewa ruang koperasi SIGMA, dan sewa kantin), sewa benda-benda tak bergerak lainnya.
- Pendapatan Jasa diperoleh dari pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi, serta pendapatan jasa giro.
- Pendapatan bunga diperoleh dari Pendapatan Bunga Lainnya yaitu jasa perbankan.
- Pendapatan Pendidikan diperoleh dari uang ujian masuk penerimaan mahasiswa baru STIS.

- Pendapatan Iuran dan Denda diperoleh dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
- Pendapatan Lain-lain diperoleh dari penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL, penerimaan kembali belanja lainnya TAYL, penerimaan kembali belanja lainnya pinjaman LN TAYL, pelunasan piutang non bendahara, pelunasan TP/TGR, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji, pendapatan penyeteroran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak, dan pendapatan anggaran lain-lain.

Adapun realisasi PNBPN yang belum terdapat estimasi seperti untuk pendapatan penjualan lainnya, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan bunga, pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu, penerimaan kembali belanja lainnya pinjaman luar negeri TAYL, pendapatan pelunasan piutang non bendahara, pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji, pendapatan penyeteroran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak, dan pendapatan anggaran lain-lain dikarenakan bahwa belum ditentukannya estimasi pendapatan dalam DIPA Tahun Anggaran 2012 BPS.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2012 dan 2011 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



**Grafik 1 : Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
Tahun Anggaran 2012 dan 2011**

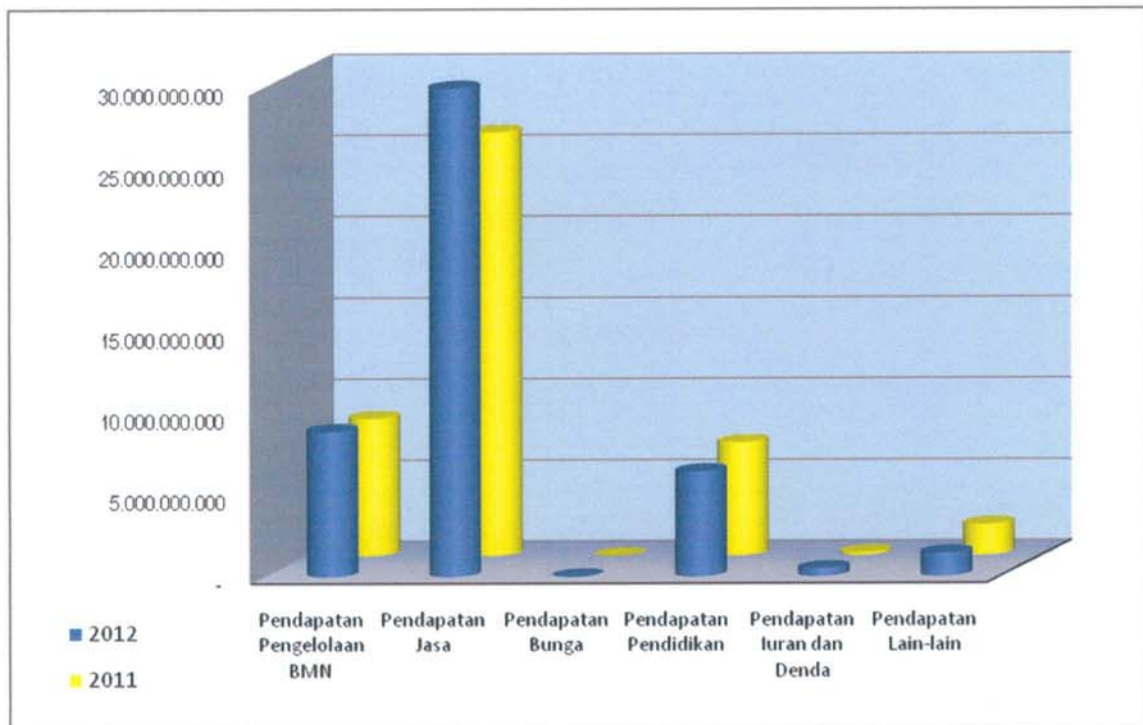
Realisasi PNPB Lainnya TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp.25.990.804.821 atau sebesar 59,82 persen dibandingkan TA 2011 sebesar Rp.43.447.748.818 menjadi Rp.69.438.553.639. Perbandingan realisasi PNPB TA 2011 dan TA 2011 disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi PNPB Tahun Anggaran 2012 dan 2011

Kode	Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dan Penjualan	8.941.594.401	8.434.375.347	507.219.054	6,01
4232	Pendapatan Jasa	52.144.902.749	26.032.137.051	26.112.765.698	100,31
4233	Pendapatan Bunga	23.116	16.357	6.759	41,32
4235	Pendapatan Pendidikan	6.469.200.000	6.957.100.000	(487.900.000)	(7,01)
4237	Pendapatan iuran dan Denda	464.823.481	148.576.463	316.247.018	212,85
4239	Pendapatan Lain-lain	1.418.009.892	1.875.543.600	(457.533.708)	(24,39)
Jumlah		69.438.553.639	43.447.748.818	25.990.804.821	59,82

Peningkatan pendapatan tersebut antara lain pada pendapatan pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dan penjualan sebesar 6,01 persen, pendapatan jasa yang berupa jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi dan jasa lembaga keuangan (jasa giro) dengan total kenaikan sebesar 100,31 persen. Pendapatan bunga yang berasal dari jasa perbankan dengan total sebesar 41,32 persen, serta pendapatan iuran dan denda yang diperoleh dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah meningkat sebesar 212,85 persen.

Di samping peningkatan dalam realisasi pendapatan tersebut, terdapat beberapa pos pendapatan pada Tahun Anggaran 2012 yang mengalami penurunan persentase dibandingkan realisasi di Tahun Anggaran 2011 yaitu realisasi pendapatan pendidikan yang berasal dari pendapatan uang ujian masuk mahasiswa STIS turun sebesar 7,01 persen serta pendapatan lain-lain sebesar 24,39 persen yang berasal dari penerimaan kembali belanja lainnya TAYL, pelunasan piutang non bendahara, pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji, pendapatan penyeteroran kelebihan hasil bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak, dan pendapatan anggaran lain-lain.



Grafik 2 : Perbandingan Realisasi PNBPN
Tahun Anggaran 2012 dan 2011

B.1.1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan (MA 4231)

Berdasarkan DIPA TA 2012, BPS mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan serta pendapatan dan penjualan adalah sebesar Rp2.598.707.356. Realisasi atas PNBPN yang berasal dari pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dan penjualan sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp8.941.594.401 atau 344,07 persen. Realisasi tersebut naik sebesar Rp507.219.054 atau 6,01 persen dari realisasi dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp8.434.375.347

Adapun rincian perolehan realisasi pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dan penjualan adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423115	Pendapatan Penjualan Obat-obatan dari hasil farmasi Lainnya	7.068.000	-	-
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	2.185.628.000	7.047.994.899	322,47
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	690.000	1.836.604	266,17
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	-	37.737.850	-
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	45.147.500	-

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	107.275.900	-
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	135.800.000	1.099.244.600	809,46
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	209.521.356	591.357.048	282,24
423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000	11.000.000	18,33
	Jumlah	2.598.707.356	8.941.594.401	344,07

B.1.2. Pendapatan Jasa (MA 4232)

Berdasarkan DIPA TA 2012, BPS mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan jasa adalah sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp25.223.073.000. Realisasi atas PNBPN yang berasal dari pendapatan jasa sebesar Rp52.144.902.749 atau 206,73 persen. Realisasi tersebut naik sebesar Rp26.112.765.698 atau 100,31 persen dari realisasi dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp26.032.137.051.

Adapun rincian perolehan realisasi pendapatan jasa adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing Kementerian dan Pendapatan DJBC	25.203.073.000	52.106.507.869	206,74
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	20.000.000	38.394.880	191,97
	Jumlah	25.223.073.000	52.144.902.749	206,73

B.1.3 Pendapatan Bunga (MA 4233)

Berdasarkan DIPA TA 2012, BPS tidak mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan bunga. Realisasi atas PNBPN yang berasal dari pendapatan bunga sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp23.116. Realisasi tersebut naik sebesar Rp6.759 atau 41,32 persen dari realisasi dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp16.357.

Adapun perolehan realisasi pendapatan bunga adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	-	23.116	-
	Jumlah	-	23.116	-

B.1.4 Pendapatan Pendidikan (MA 4235)

Berdasarkan DIPA TA 2012, BPS mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan pendidikan adalah sebesar Rp3.600.750.000. Realisasi atas PNBPN yang berasal dari pendapatan pendidikan sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp6.469.200.000 atau 179,66 persen. Realisasi tersebut turun sebesar Rp487.900.000 atau 7,01 persen dari realisasi dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp6.957.100.000.

Adapun rincian perolehan realisasi pendapatan pendidikan adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423512	Pendapatan uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	2.789.250.000	6.469.200.000	231,93
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	811.500.000	-	-
	Jumlah	3.600.750.000	6.469.200.000	179,66

B.1.5 Pendapatan Iuran dan Denda (MA 4237)

Berdasarkan DIPA TA 2012, BPS tidak mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan iuran dan denda. Realisasi atas PNBPN yang berasal dari pendapatan iuran dan denda sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp464.823.481. Realisasi tersebut naik sebesar Rp316.247.018 atau 212,85 persen dari realisasi dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp148.576.463.

Adapun perolehan realisasi pendapatan iuran dan denda adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	464.823.481	-
	Jumlah	-	464.823.481	-

B.1.6 Pendapatan Lain-lain (MA 4239)

Berdasarkan DIPA TA 2012, BPS mengestimasi PNBPN yang berasal dari pendapatan lain-lain sebesar Rp1.596.000. Realisasi atas PNBPN yang berasal dari pendapatan lain-lain sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.418.009.892 atau 88.847,74 persen. Realisasi tersebut turun sebesar Rp457.533.708 atau 24,39 persen dari realisasi dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.875.543.600.

Adapun rincian realisasi pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	379.587.195	-
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	1.596.000	530.348.975	33.229,89
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinj. LN TAYL	-	395	-
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-	1.363.636	-
423922	Pendapatan Pelunasan ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	-	320.719.854	-
423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	7.360.420	-
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-	10.575.000	-
423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	168.054.417	-
	Jumlah	1.596.000	1.418.009.892	88.847,73

Realisasi
Belanja
Rp2.654.700.228.593

B.2. BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Badan Pusat Statistik pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp2.654.700.228.593 atau 92,94 persen dari anggaran yang sebesar Rp2.856.342.913.000.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2012 menurut program dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2012

Kode	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
054.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	1.645.862.040.000	1.497.968.299.542	91,01
054.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	301.589.074.000	284.828.562.050	94,44
054.01.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	4.550.000.000	4.243.369.417	93,26
054.01.06	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	904.341.799.000	867.659.997.584	95,94
Jumlah		2.856.342.913.000	2.654.700.228.593	92,94

Realisasi Belanja menurut program pada Tahun Anggaran 2012 berasal dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS sebesar Rp.1.497.968.299.542, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS sebesar Rp.284.828.562.050, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS sebesar Rp.4.243.369.417, dan Program Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebesar Rp.867.659.997.584.

Sedangkan Realisasi Belanja menurut sumber dana pada Tahun Anggaran 2012 terdiri dari sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp2.600.516.979.571, PNPB sebesar Rp49.943.503.028, dan Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp850.000.000, Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp3.389.745.994. Belanja sumber dana Rupiah Murni adalah belanja yang sumber dananya berasal dari APBN sedangkan Belanja sumber dana Hibah adalah belanja yang sumber dananya berasal dari Hibah yang telah mendapat pengesahan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan disajikan dalam DIPA. Khusus untuk realisasi belanja dengan sumber dana hibah Tahun Anggaran 2012 akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian B3 Catatan Penting Lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Rincian realisasi belanja menurut sumber dana Tahun Anggaran 2012 dapat disajikan pada Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2012

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Rupiah Murni	2.695.839.917.000	2.600.516.979.571	96,46
02	Pinjaman LN	89.792.000.000	-	0,00
03	Rupiah Murni Pendamping	2.500.000.000	-	0,00
04	PNBP	60.096.860.000	49.943.503.028	83,11
09	Hibah Luar Negeri	1.374.335.000	-	0,00
10	Hibah Langsung Dalam Negeri	850.000.000	850.000.000	100,00
11	Hibah Langsung Luar Negeri	5.889.801.000	3.389.745.994	57,55
Jumlah		2.856.342.913.000	2.654.700.228.593	92,94

Anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman luar negeri untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp89.792.000.000, rupiah murni pendamping sebesar Rp2.500.000.000, dan hibah luar negeri sebesar Rp1.374.335.000 belum terealisasi pada Tahun Anggaran 2012 dijelaskan pada bagian B3.

Perbandingan Realisasi Belanja menurut sumber dana Tahun Anggaran 2012 dan 2011 disajikan pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2012 dan 2011

Kode	Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Rupiah Murni	2.600.516.979.571	2.427.612.423.907	172.904.555.664	7,12
02	Pinjaman LN	-	-	-	-
03	Rupiah Murni Pendamping	-	-	-	-
04	PNBP	49.943.503.028	30.700.625.889	19.242.877.139	62,68
09	Hibah Luar Negeri	-	5.566.261.353	(5.566.261.353)	(100,00)
10	Hibah Langsung Dalam Negeri	850.000.000	6.592.057.259	(5.742.057.259)	(87,11)
11	Hibah Langsung Luar Negeri	3.389.745.994	11.769.298.585	(8.379.552.591)	(71,20)
Jumlah		2.654.700.228.593	2.482.240.666.993	172.459.561.600	6,95

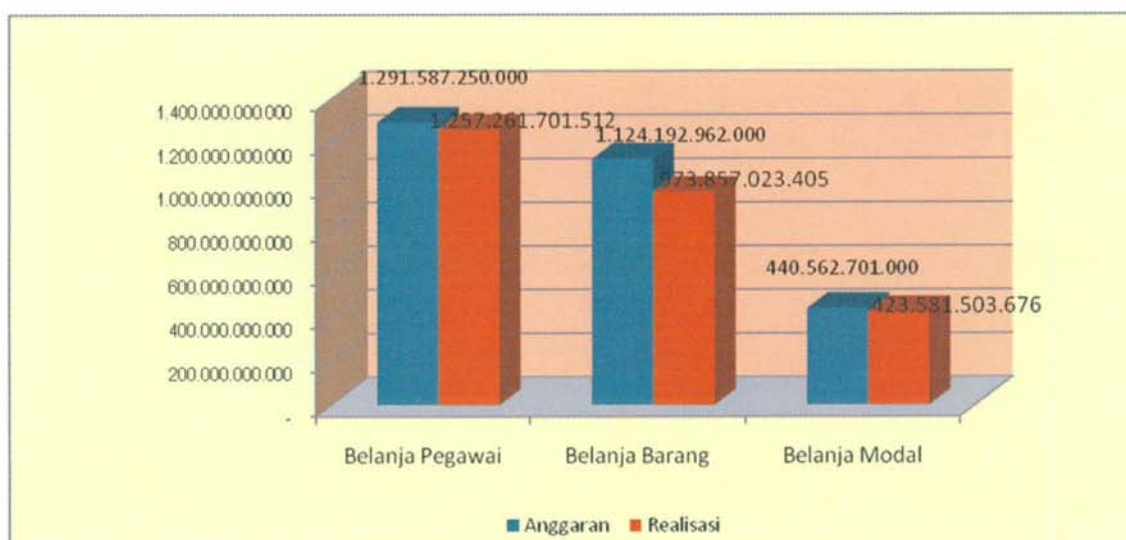
Realisasi belanja menurut sumber dana rupiah murni pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp2.600.516.979.571 atau naik sebesar 7,12 persen dibanding realisasi tahun 2011 yang sebesar Rp2.427.612.423.907, kenaikan realisasi juga terjadi pada belanja sumber dana PNBP yang mengalami kenaikan 62,68 persen dari tahun 2011, sedangkan penurunan realisasi apabila dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi pada belanja hibah.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2012 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Anggaran dan Belanja Tahun Anggaran 2012

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	Belanja Pegawai	1.291.587.250.000	1.257.261.701.512	97,34
52	Belanja Barang	1.124.192.962.000	973.857.023.405	86,63
53	Belanja Modal	440.562.701.000	423.581.503.676	96,15
Jumlah		2.856.342.913.000	2.654.700.228.593	92,94

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 3. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2012

Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2012 dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya seperti pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012 dan 2011

Kode	Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	Belanja Pegawai	1.257.261.701.512	674.851.220.122	582.410.481.390	86,30
52	Belanja Barang	973.857.023.405	1.468.004.025.014	(494.147.001.609)	(33,66)
53	Belanja Modal	423.581.503.676	339.385.421.857	84.196.081.819	24,81
Jumlah		2.654.700.228.593	2.482.240.666.993	172.459.561.600	6,95

Secara keseluruhan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2012 mengalami peningkatan sebesar 6,95 persen dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Peningkatan terbesar terdapat pada realisasi Belanja Pegawai sebesar 86,30 persen disebabkan oleh adanya belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan), kenaikan gaji pegawai negeri dan penerimaan pegawai negeri baru lulusan STIS di lingkungan BPS. Kemudian realisasi Belanja modal mengalami peningkatan 24,81 persen disebabkan oleh meningkatnya belanja modal tanah dan belanja modal jaringan. Sedangkan penurunan pada Belanja Barang sebesar 33,66 persen.

Belanja Pegawai **B.2.1. Belanja Pegawai**
Rp1.257.261.701.512

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp1.257.261.701.512 atau 97,34 persen dari anggarannya sebesar Rp1.291.587.250.000. Realisasi Tahun Anggaran 2012 tersebut naik sebesar Rp582.410.481.390 atau 86,30 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp674.851.220.122.

Rincian Anggaran dan Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Anggaran dan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	751.776.816.000	747.845.667.911	99,48
5122	Belanja Lembur	650.201.000	616.206.000	94,77
5123	Belanja Vakasi	385.170.000	249.540.000	64,79
5124	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	538.775.063.000	508.550.287.601	94,39
Jumlah		1.291.587.250.000	1.257.261.701.512	97,34

Kenaikan ini terdapat pada realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS yang disebabkan oleh kenaikan gaji PNS di Tahun Anggaran 2012 dan adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil baru lulusan STIS di lingkungan BPS sebesar 11,70 persen, kenaikan belanja vakasi dan kenaikan terbesar terjadi pada belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito, berdasar Perpres nomor 110 tahun 2012 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang dibayarkan sebanyak 13 bulan. Sedangkan penurunan pada realisasi belanja lembur disebabkan oleh efisiensi dan optimalisasi anggaran negara.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel 15 berikut:

Tabel 15
Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 dan 2011

Kode	Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	748.354.852.002	669.966.493.854	78.388.358.148	11,70
5122	Belanja Lembur	616.206.000	5.115.621.950	(4.499.415.950)	(87,95)
5123	Belanja Vakasi	249.540.000	209.057.000	40.483.000	19,36
5124	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	508.550.287.601	-	508.550.287.601	-
Realisasi Belanja Bruto		1.257.770.885.603	675.291.172.804	582.479.712.799	86,26
Pengembalian Belanja		509.184.091	439.952.682	69.231.409	15,74
Realisasi Belanja Netto		1.257.261.701.512	674.851.220.122	582.410.481.390	86,30

Jumlah realisasi Belanja Pegawai pada tabel diatas merupakan nilai netto, yaitu nilai bruto Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.257.770.885.603 dikurangi dengan pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp509.184.091. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 nilai brutonya adalah sebesar Rp675.291.172.804 dikurangi dengan pengembalian belanja pegawai Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp439.952.682.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 seluruhnya bersumber dari dana rupiah murni.

Belanja Barang
Rp973.857.023.405

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp973.857.023.405 atau 86,63 persen dari anggarannya sebesar Rp1.124.192.962.000. Realisasi Tahun Anggaran 2012 tersebut turun sebesar Rp494.147.001.609 atau 33,66 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2011 yang sebesar Rp1.468.004.025.014.

Rincian Anggaran dan Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Anggaran dan Belanja Barang Tahun Anggaran 2012

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5211	Belanja Barang Operasional	85.006.579.289	81.416.037.986	95,78
5212	Belanja Barang Non Operasional	755.645.183.100	721.172.855.786	95,44
5221	Belanja Jasa	123.960.072.221	27.830.155.878	22,45
5231	Belanja Pemeliharaan	75.096.048.390	69.956.691.966	93,16
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	80.453.973.000	72.745.196.968	90,41
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	4.031.106.000	736.084.821	18,26
Jumlah		1.124.192.962.000	973.857.023.405	86,63

Penurunan ini disebabkan karena pada tahun 2012 dilakukan efisiensi dan optimalisasi pada anggaran pemerintah. Penurunan terjadi pada belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja perjalanan dalam negeri, belanja perjalanan luar negeri. Kenaikan hanya terjadi pada belanja pemeliharaan sebesar 13,62 persen.

Rincian Realisasi Belanja Barang disajikan dalam Tabel 17 berikut:

Tabel 17
Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 dan 2011

Kode	Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5211	Belanja Barang Operasional	81.428.110.486	83.233.807.972	(1.805.697.486)	(2,17)
5212	Belanja Barang Non Operasional	721.303.288.077	1.171.606.838.768	(450.303.550.691)	(38,43)
5221	Belanja Jasa	27.835.421.140	34.706.891.537	(6.871.470.397)	(19,80)
5231	Belanja Pemeliharaan	69.965.803.548	61.578.488.487	8.387.315.061	13,62
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	72.780.076.118	116.010.311.843	(43.230.235.725)	(37,26)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	736.084.821	983.525.315	(247.440.494)	(25,16)
Realisasi Belanja Bruto		974.048.784.190	1.468.119.863.922	(494.071.079.732)	(33,65)
Pengembalian Belanja		191.760.785	115.838.908	75.921.877	65,54
Realisasi Belanja Netto		973.857.023.405	1.468.004.025.014	(494.147.001.609)	(33,66)

Jumlah realisasi Belanja Barang pada tabel diatas merupakan nilai netto, yaitu nilai bruto Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp974.048.784.190 dikurangi dengan pengembalian Belanja Barang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp191.760.785. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 nilai brutonya adalah sebesar Rp1.468.119.863.922 dikurangi dengan pengembalian belanja barang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp115.838.908.

Belanja Modal
Rp423.581.503.676

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp423.581.503.676 atau 96,15 persen dari anggarannya sebesar Rp440.562.701.000. Realisasi Tahun Anggaran 2012 naik sebesar Rp84.196.081.819 atau 24,81 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp339.385.421.857.

Peningkatan ini terdapat pada realisasi Belanja Modal untuk Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan yaitu dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pengembangan gedung-gedung kantor baru di daerah.

Rincian Anggaran dan Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Anggaran dan Belanja Barang Modal Tahun Anggaran 2012

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5311	Belanja Modal Tanah	67.413.076.000	65.378.336.900	96,98
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.563.646.000	83.809.005.108	99,11
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.766.142.000	125.714.153.629	89,95
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.396.881.000	11.379.885.913	99,85
5361	Belanja Modal Lainnya	137.422.956.000	137.300.122.126	99,91
Jumlah		440.562.701.000	423.581.503.676	96,15

Rincian Realisasi Belanja Modal disajikan dalam Tabel 19 berikut:

Tabel 19
Perbandingan Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 dan 2011

Kode	Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
5311	Belanja Modal Tanah	65.378.346.900	11.007.224.640	54.371.122.260	493,96
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.810.085.029	99.209.611.258	(15.399.526.229)	(15,52)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.728.810.949	229.124.056.473	(103.395.245.524)	(45,13)
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.379.885.913	57.400.000	11.322.485.913	19.725,59
5361	Belanja Modal Lainnya	137.300.122.126	-	137.300.122.126	-
Realisasi Belanja Bruto		423.597.250.917	339.398.292.371	84.198.958.546	24,81
Pengembalian Belanja		15.747.241	12.870.514	2.876.727	22,35
Realisasi Belanja Netto		423.581.503.676	339.385.421.857	84.196.081.819	24,81

Jumlah realisasi Belanja Modal pada tabel diatas merupakan nilai netto, yaitu nilai bruto Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp423.597.250.917 dikurangi dengan pengembalian Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp15.747.241. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2011 nilai brutonya adalah sebesar Rp339.398.292.371 dikurangi dengan pengembalian belanja barang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp12.870.514.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2012 (*Audited*) disusun berdasarkan pertemuan tripartit antara Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang), yang kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BA 054) Tahun 2012 Nomor NK.081/PB.6.4/2013 tanggal 19 April

2013 dan telah ditandatangani oleh ketiga instansi di atas. Nota Kesepakatan terlampir.

2. Anggaran BPS per 31 Desember 2012 sumber pendanaannya selain dari APBN/Rupiah Murni (RM) juga terdapat sumber pendanaan dari Pinjaman Luar Negeri (PLN), Hibah Luar Negeri (HLN) dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) yang diterima beberapa Direktorat BPS dari Lembaga Internasional untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perstatistikan serta Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN), selain itu menjalin kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pinjaman Luar Negeri/PLN, sebesar Rp89.792.000.000 dengan penjelasan berikut:

- 1) Cara Penarikan Reksus (RK) di KPPN Jakarta VI;
- 2) Penanggungjawab kegiatan PMU Statcap;
- 3) Digunakan untuk kegiatan *Statistical Capacity Building-Change and Reform For The Development Of Statistics (STATCAP-CERDAS) Project*;
- 4) Realisasi sebesar Rp0, anggaran ini belum terserap sampai Triwulan IV Tahun 2012 disebabkan penyusunan *Bidding* dokumen untuk seluruh paket Statcap Cerdas memerlukan waktu cukup panjang, sehingga berdampak pada mundurnya jadwal pengadaan beberapa Paket *Bidding*. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - TOR/*Scope areas* masih belum final, sedang dilakukan reviu dalam rangka *resizing*;
 - Dokumen pendukung untuk *Bidding* masih memerlukan perbaikan, disesuaikan dengan versi hasil re-reviu cakupan setiap paket;
 - Perlu referensi dan *technical assistance* dalam penyusunan *cost estimates* untuk setiap paket;
 - Nol dari pihak World Bank belum turun, disebabkan oleh proses evaluasi *shortlisting* yang belum disetujui dan RFP yang belum siap. Hal ini khususnya untuk Paket *Statistical Transformation & Quality Improvement* serta Paket *Owner's Agent*.

Tindak lanjut yang dilakukan, antara lain:

- Melakukan pembahasan secara intensif pada masing-masing Sub Komite untuk menyelesaikan proses *resizing* setiap Paket Sub Komite 1 untuk Paket *Statistical Transformation & Quality Improvement*; Sub Komite 2 untuk Paket *ICT Strategy & Design*; serta Sub Komite 3 untuk Paket HR OA IA, sedangkan untuk Paket *Owner's Agent* dibahas secara intensif oleh Tim PMU dan Panda *Owner's Agent*.
- PMU memfasilitasi Panda (Panitia Pengadaan) untuk mengejar ketertinggalan jadwal pengadaan, dengan cara bersama-sama melakukan revisi perbaikan evaluasi hasil *shortlist Owner's Agent* maupun Paket *Statistical Transformation & Quality Improvement*.

- b. Hibah Langsung Luar Negeri/HLLN dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dirinci sebagai berikut:

Dalam anggaran DIPA Tahun Anggaran 2012 Satker Sekretariat Utama BPS terdapat sumber pendanaan belanja Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) sebesar Rp5.889.801.000 dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp91.166.335.000 yang diterima beberapa Direktorat di BPS yang berasal dari Lembaga Internasional untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perstatistikan, selain hibah juga terdapat kerjasama dengan kementerian dan Lembaga lainnya.

Realisasi HLLN sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 yang telah disahkan dengan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) (*unaudited*) semula sebesar Rp3.271.078.643 telah terkoreksi pada Laporan Keuangan *Audited* ini menjadi sebesar Rp3.389.745.994, dikarenakan terdapat belanja Hibah UNFPA pada tahun 2012 yang belum dicatat sebagai realisasi belanja hibah dalam neraca per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp118.667.351 dan untuk PLN sampai dengan akhir tahun anggaran belum terdapat realisasi belanja.

Terdapat pengembalian pendapatan hibah yang disetor ke Kas Negara dan ke Pemberi Hibah masing-masing untuk dana Hibah WHO sebesar Rp24.549.125 dan UNFPA sebesar Rp222.246.711 Rincian Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri yang telah di SPHL-kan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 20
Rincian Realisasi dan Sisa Dana HLLN dan PLN yang sudah SPHL

Donor HLLN/PLN	Nomor Register	Dana dalam DIPA 2012 (Rp)	Pendapatan Hibah s.d Tahun 2012	Realisasi SPHL (Rp)	Pengembalian Pendapatan Hibah	Sisa Saldo Dana Hibah (Rp)	Penanggung Jawab Kegiatan	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
WHO	71734001	319.136.000	319.136.188	294.587.063	24.549.125	-	Stat. Kesra	Global Adult Tobacco Survey (GATS)
ADB	71801901	450.000.000	324.366.385	151.501.000	-	172.865.385	Stat. Kesra	Updating and Improving the Social Protection Index (SPI)
UNICEF	71501901	3.098.445.000	1.272.480.953	1.272.480.953	-	-	Stat. Kesra	Multiple Indicator Cluster Survey (MICS)
UNFPA	71509501	1.778.977.000	1.830.381.264	1.444.436.478	222.246.711	163.698.075	Stat. Kependudukan	Country Program Action Plan Part VIII
ADB	72205701	243.243.000	312.975.889	226.740.500	-	86.235.389	Stat. Harga	International Comparison Program
World Bank	71243301	1.374.335.000	-	-	-	-	Statcap Cerdas	KTF Support for Statistical Capacity Building
World Bank (PLN)	10.819.501	89.792.000.000	-	-	-	-	Statcap Cerdas	Preparation of Strengthening the National Statistical System of Indonesia Project
Total		97.056.136.000	4.059.340.679	3.389.745.994	246.795.836	422.798.849		

Dalam anggaran (DIPA TA.2012 Satker Sekretariat Utama BPS Pusat) per 31 Desember 2012 terdapat sumber pendanaan belanja dari Pinjaman Luar Negeri (PLN), Hibah Luar Negeri (HLN) dan Hibah Luar Negeri Langsung (HLNL) yang diterima beberapa Direktorat di BPS dari Lembaga Internasional untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perstatistikan. Rekening penampungan dana yang bersumber dari Hibah Luar Negeri/HLN dan Hibah Luar Negeri Langsung/HLNL dibedakan dengan rekening APBN.

Hibah Luar Negeri/HLN, Hibah Langsung Luar Negeri/HLLN per 31 Desember 2012 sebagai berikut:

- 1) World Bank (TF-098283-IBRD-71243301), dengan pagu dalam DIPA 2012 sebesar Rp1.374.335.000,-
 - Cara Penarikan Penarikan Langsung (PL) sebesar Rp914.336.000,- dan Reksus (RK) sebesar Rp459.999.000,-
 - Realisasi sebesar Rp0, sisa pagu sebesar Rp1.374.335.000.
 - Penanggungjawab kegiatan adalah PMU Statcap-Cerdas.
 - Digunakan untuk kegiatan *KTF Support For Statistical Capacity Building*.
- 2) International Org. – UNICEF (71501901), dengan pagu dalam DIPA 2012 sebesar Rp3.098.445.000.
 - Cara Penarikan Lain-Lain (LL).
 - Realisasi sebesar Rp1.272.480.953, sisa pagu sebesar Rp1.825.964.047.
 - Penanggungjawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
 - Digunakan untuk kegiatan *Social Policy and Multiple Indicator Cluster Survey*.
- 3) WHO (TF-71734001), dengan pagu dalam DIPA 2012 sebesar Rp319.136.000,-
 - Cara Penarikan Lain-Lain (LL)
 - Realisasi sebesar Rp319.136.000, termasuk sisa pagu sebesar Rp.24.549.125 yang seluruhnya telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp24.463.658 selisih sebesar Rp85.467 merupakan biaya administrasi dan bunga atas dana tersebut yang langsung dipotong saat penutupan dan penyetoran dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan nomor NTPN 0704000311151513.
 - Penanggungjawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
 - Digunakan untuk kegiatan *Global Adults Tobacco Survey* (Survei Penggunaan Tembakau Indonesia/SPTI).
- 4) ADB/R-CDTA7601 (71801901), dengan pagu dalam DIPA 2012 sebesar Rp450.000.000.
 - Cara Penarikan Lain-Lain (LL).
 - Realisasi sebesar Rp151.501.000, sisa pagu sebesar Rp298.499.000.
 - Penanggungjawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
 - Digunakan untuk kegiatan *Updating and Improving the Social Protection Index* (SPI).

- 5) ADB-ICP (72205701), dengan pagu dalam DIPA 2012 sebesar Rp243.243.000,-
 - Cara Penarikan Lain-Lain (LL).
 - Realisasi sebesar Rp226.740.500, sisa pagu sebesar Rp16.502.500.
 - Penanggungjawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Harga.
 - Digunakan untuk kegiatan *International Comparison Program* (ICP).
 - 6) UNFPA (71509501), dengan pagu dalam DIPA 2012 sebesar Rp1.778.977.000.
 - Cara Penarikan Lain-Lain (LL).
 - Realisasi sebesar Rp1.325.769.127, sisa pagu sebesar Rp453.207.873.
 - Penanggungjawab kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan.
- c. Hibah Dalam Negeri/HDN yang diterima oleh satker BPS Provinsi Banten sebesar Rp850.000.000.
- 1) Hibah dengan nomor registrasi 72598801;
 - 2) Digunakan untuk Penyusunan Dokumen Data Makro Provinsi Banten Tahun 2012 yang meliputi penyusunan Banten Dalam Angka (BDA) Tahun 2012, penyusunan tabel input output (I-O), materi diarahkan kepada sektor Industri secara lengkap dan penyelenggaraan Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) PDRB Se-Jabalnusra Tahun 2012 di Banten; dan
 - 3) Nilai hibah yang masuk dalam pagu DIPA Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp850.000.000 telah direalisasi dan dilakukan pengesahan sebesar Rp850.000.000, sehingga sisa DIPA Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp0. Nilai hibah tersebut untuk membiayai kegiatan:
 - Penyusunan Banten Dalam Angka (BDA) Tahun 2012 sebesar Rp255.770.000.
 - Penyusunan Tabel Input Output (I-O) sebesar Rp357.250.000; dan
 - Penyelenggaraan Konsultasi Regional Pembangunan (Konregbang) PDRB Se-Jabalnusra Tahun 2012 sebesar Rp236.980.000.
3. Pada tahun 2012 Badan Pusat Statistik menjalin kerja sama dengan beberapa Kementerian Negara/Lembaga, Bank Indonesia, dan lainnya, yaitu:
- a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
 - Perjanjian kerja sama nomor 6/KSM/H3/2012 dan nomor 01/KS/12-I/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012;
 - Bentuk kerja sama PNBK;
 - Sumber pendanaan dari APBN (DIPA Satuan Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BKKBN Tahun 2012);

- Nilai kerja sama sebesar Rp36.595.436.000;
- Waktu pelaksanaan mulai tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 (344 hari kalender);
- Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS; dan
- BPS bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, pelaksanaan lapangan, pengolahan data, dan penulisan laporan pendahuluan SDKI2012, melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai target dan jadwal yang telah disepakati para pihak, menindaklanjuti laporan tertulis dari pihak pertama, memberikan data set hasil SDKI2012 kepada pihak pertama, memberikan laporan pendahuluan berisi profil fertilitas dan keluarga berencana kepada pihak pertama, dan tidak mengalihkan dan/atau menyerahkan pekerjaan yang telah diterima dari pihak pertama baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain.

b. Kementerian Pertanian (Kementan).

- Perjanjian kerja sama nomor 54B/Kpts/Kp.340/A6/01/012 dan nomor 02/KS/09-I/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Berkesinambungan Pada Skala Nasional Tahun 2012;
- Bentuk kerja sama Swakelola;
- Sumber pendanaan dari APBN (DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Tahun Anggaran 2012 Nomor 0328/0.018-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 pada Kode Anggaran 1751.001.009 pada komponen BPS Provinsi dan BPS Pusat);
- Nilai kerja sama sebesar Rp20.352.862.000;
- Waktu pelaksanaan mulai tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- Lingkup kegiatan berada di 17 BPS Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan) dimana masing-masing provinsi membuka rekening untuk menampung dana untuk kegiatan tersebut;
- Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
- BPS bertugas melaksanakan kegiatan upaya percepatan penyediaan data dan peningkatan kualitas data tanaman pangan berkelanjutan pada skala nasional sehingga diperoleh data per kecamatan dan data rekapitulasi per provinsi dan per kabupaten/kota, menyerahkan rekapitulasi data per kabupaten/kota di 17 provinsi dalam bentuk *softcopy*.

- c. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- 1) Penyusunan Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2011;
 - Perjanjian kerja sama nomor 188/BKS-PDT/03/2012 dan nomor 07/KS/26-III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penyusunan Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2011;
 - Bentuk kerja sama Swakelola
 - Sumber pendanaan dari DIPA Satker Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 0299/027-11.1.01/00/2012 Tanggal 9 Desember 2011.
 - Nilai kerja sama sebesar Rp444.264.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan 14 Desember 2012
 - Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyediaan dan pengolahan serta analisis data guna penyusunan Publikasi Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2011.
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS; dan
 - BPS bertugas:
 - i. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan KAK;
 - ii. Menyusun dan menyediakan data Profil Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Indonesia Tahun 2011;
 - iii. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan laporan penggunaan keuangan;
 - iv. Mengembalikan sisa anggaran UP dan TUP yang tidak dibelanjakan dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - v. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk memperoleh pembayaran pada setiap tahap kegiatan.
 - 2) Penyusunan Rekomendasi Analisis Data Kemiskinan Berdasar Data PPLS 2011;
 - Perjanjian kerja sama nomor 319/BKS-PDT/09/2012 dan nomor 42/KS/10-IX/2012 tentang Penyusunan Rekomendasi Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data PPLS 2011;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dari DIPA Satker Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI Nomor: 0299/027-11.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;

- Nilai kerja sama sebesar Rp66.798.000;
- Waktu pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama oleh para pihak sampai dengan 31 Desember 2012 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyediaan analisis data kemiskinan berdasarkan data PPLS 2011;
- Penanggung jawab kegiatan ini Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik;
- BPS bertugas;
 - a) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan KAK dan RAB
 - b) Menyusun dan menyediakan rekomendasi data kemiskinan berdasarkan data PPLS 2011; dan
 - c) Membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan keuangan.
- Penyerahan keseluruhan hasil pekerjaan dilaksanakan setelah tahap penyajian dan publikasi selesai keseluruhan dengan jangka waktu selambat-lambatnya pada tanggal 28 Desember 2012.

d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- 1) Pemuktahiran dan Pemetaan Data Penduduk Tuna Aksara Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 di Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
 - Perjanjian kerja sama nomor 834/B4/MS/2012 dan nomor 13/KS/29-V/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pemuktahiran dan Pemetaan Data Penduduk Tuna Aksara Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 di Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dari DIPA Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 0534/023-05.1.01/00/2012 Revisi ke-2 tanggal 23 Februari 2012;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp1.000.000.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan 14 November 2012;
 - Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pemuktahiran data dan estimasi serta pemetaan data guna penyusunan Publikasi Data Penduduk Tuna Aksara di Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS; dan

- BPS bertugas:
 - a) Melakukan pemutakhiran data persebaran penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun hasil Sensus Penduduk 2010 pada daerah konsentrasi tuna aksara di Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur sampai dengan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, menurut jumlah dan persentase, jenis kelamin, dan kelompok umur: 15-24 tahun, 25-44 tahun, 45-49 tahun, 15-59 tahun dan 60 tahun ke atas;
 - b) Melakukan estimasi data persebaran penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun hasil Sensus Penduduk 2010 pada daerah selain butir (1) di Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur sampai dengan tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, menurut jumlah dan persentase, jenis kelamin, dan kelompok umur: 15-24 tahun, 25-44 tahun, 15-59 tahun;
 - c) Melakukan estimasi data persebaran penduduk tuna aksara usia 60 tahun ke atas hasil Sensus Penduduk 2010 di Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;
 - d) Melakukan pemetaan data penduduk tuna aksara di Kabupaten Jember dan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, dalam bentuk system informasi geospasial (SIG) atau *Geospatial Information System* (GIS); dan
- 2) Dukungan Sensus Nasional Bidang Kebudayaan Tahun 2012;
 - Perjanjian kerja sama nomor 668/SRT/KS/Setditjen/Bud/IX/2012 dan nomor 28/KS/17-IX/2012 tentang Dukungan Sensus Nasional Bidang Kebudayaan Tahun 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dibebankan pada DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 5348/023-15.1.01/00/2012 tanggal 16 Agustus 2012;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp2.000.000.000;
 - Waktu pelaksanaan terhitung sejak perjanjian kerja sama ditandatangani oleh para pihak dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat Deputi Bidang Statistik Sosial BPS; dan
 - BPS bertugas:
 - i. Menyiapkan desain kegiatan, pedoman / petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - ii. Melakukan percepatan perolehan data kebudayaan yang dikumpulkan melalui Susenas MSBP 2012, agar publikasinya dapat disajikan pada bulan Desember 2012. Berdasarkan *Advance Release Calender* (ARC) BPS, publikasi hasil SUSENAS MSBP 2012 dijadwalkan pada bulan Juli 2013;

- iii. Mengkompilasi data hasil sensus / survei meliputi hasil SP2010, Susenas 2011-2012, Sakernas 2011, dan Podes 2011, dalam publikasi Statistik Kebudayaan Tahun 2012;
 - iv. Menyampaikan kembali sisa anggaran UP dan TUP yang tidak dibelanjakan dan/ atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - v. Menyusun laporan kemajuan kegiatan, menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan dan laporan penggunaan anggaran disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
- Penyerahan seluruh hasil pekerjaan oleh BPS selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2012.
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
- 1) Pengelolaan Data Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi);
 - Perjanjian kerja sama nomor B.231/PDSI/HK.210/II/2012 dan nomor 04/KS/16-II/2012 tanggal 16 Februari 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dari APBN (DIPA Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 Nomor 0145/032-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011);
 - Nilai kerja sama sebesar Rp682.992.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Harga BPS; dan
 - BPS bertugas melaksanakan pekerjaan pengelolaan Data Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - 2) Penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) *Satelite*;
 - Perjanjian kerja sama nomor: B.439.1/SJ.6/HK.145/IV/2012 dan nomor 08/KS/19-IV/2012 tanggal 19 April 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dari APBN (DIPA Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 Nomor 0145/032-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011);
 - Nilai kerja sama sebesar Rp1.435.050.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 19 April sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Neraca Produksi BPS; dan

- BPS bertugas melaksanakan pekerjaan Penyusunan Data PDB dan PDRB Satellite Kelautan dan Perikanan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 3) Penyusunan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
- Perjanjian kerja sama nomor: B.351/PSDI/HK.145/III/2012 dan nomor 15/KS/19-III/2012 tanggal 19 Maret 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dari DIPA Pusat Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 No. 0145/032-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp495.010.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 19 Maret sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS; dan
 - BPS bertugas melaksanakan pekerjaan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- f. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Bidang Polhukam).
- Perjanjian kerja sama nomor PK-01/PPKBP/POLHUKAM/2/2012 dan nomor 06/KS/17-IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penyelenggaraan Survei Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2012;
 - Bentuk kerja sama PNBK;
 - Sumber pendanaan dari APBN (DIPA Kementerian Koordinator Bidang Polhukam tahun 2012 Nomor: 0001/034-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011);
 - Nilai kerja sama sebesar Rp8.182.389.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 17 April sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS; dan
 - BPS bertugas melaksanakan pekerjaan pengumpulan dan pengolahan data untuk Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2011 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).

g. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 1) Penyusunan Publikasi Profil Perempuan Indonesia Tahun 2012;
 - Perjanjian kerja sama nomor 23B/KPP-PA/Deputi III/2/2012 dan nomor 09/KS/23-II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penyusunan Publikasi Profil Perempuan Indonesia Tahun 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dari DIPA Satker Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 Nomor: 0011/047-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011);
 - Nilai kerja sama sebesar Rp60.000.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS; dan
 - BPS bertugas melaksanakan pekerjaan pengumpulan dan pengolahan data untuk Penyusunan Publikasi Profil Perempuan Indonesia 2012 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 2) Penyusunan Publikasi Profil Anak Indonesia Tahun 2012;
 - Perjanjian kerja sama nomor 23C/KPP-PA/Deputi III/2/2012 dan nomor 10/KS/23-II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penyusunan Publikasi Profil Anak Indonesia Tahun 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dari DIPA Satker Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 Nomor: 0011/047-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp60.000.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS; dan
 - BPS bertugas melaksanakan pekerjaan pengumpulan dan pengolahan data untuk Penyusunan Publikasi Profil Anak Indonesia 2012 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 3) Penyusunan Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2012;
 - Perjanjian kerja sama nomor 23C/KPP-PA/Deputi III/2/2012 dan nomor 21/KS/23-II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penyusunan Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;

- Sumber pendanaan dari DIPA Satker Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 Nomor: 0011/047-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp100.000.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 15 November 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS; dan
 - BPS bertugas melaksanakan pekerjaan pengumpulan dan pengolahan data untuk Penyusunan Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- 4) Penyusunan Profil Penduduk Lanjut Usia Perempuan Tahun 2011;
- Perjanjian kerja sama nomor 04/SET/KPP-PA/PPK/D.03/07/2012 dan nomor 29/KS/09-VII/2012 tentang Penyusunan Profil Penduduk Lanjut Usia Perempuan Tahun 2011;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dari DIPA Satker Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 No.0011/47-01.1.01/00/2012, tanggal 9 Desember 2011;
 - Nilai kerja sama Rp85.000.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS; dan
 - BPS bertugas:
 - i. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan KAK dan RAB;
 - ii. Menyusun dan menyediakan data Publikasi Profil Penduduk Lanjut Usia Perempuan Tahun 2011;
 - iii. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan laporan penggunaan keuangan; dan
 - iv. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pihak pertama untuk memperoleh pembayaran pada setiap tahap pekerjaan.
- h. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan.
- Perjanjian kerja sama nomor S.47/RM/DIPA/07/2012 dan nomor 12/KS/23-VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 tentang Penyelenggaraan Penyusunan Produk Domestik 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;

- Sumber pendanaan dari DIPA Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2012 No. 0149/029-06.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp684.620.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Neraca Produksi BPS; dan
 - BPS bertugas melaksanakan pekerjaan pengumpulan dan pengolahan data untuk Penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) Kawasan Hutan di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Tahun 2010-2011.
- i. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung.
- Perjanjian kerja sama nomor 14/KS/16-VII/2012 dan nomor 1652A/II.C07/DN//2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Pendidikan Program Studi Magister (S2) Informatika;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dari DIPA BPS dengan mengikuti mekanisme dan prosedur pencairan Keuangan Negara yang berlaku akan dibayarkan ke ITB untuk biaya pendidikan;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp940.500.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
 - Penanggung jawab kegiatan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung; dan
 - BPS bertugas menanggung biaya pendidikan peserta didik.
- j. Bank Indonesia (BI).
- 1) Perolehan Data Inflasi dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Tahun 2012;
- Perjanjian kerja sama nomor 14/5/SDM dan nomor 16/KS/02-VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Perolehan Data Inflasi dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Tahun 2012;
 - Bentuk kerja sama PNBP;
 - Sumber pendanaan dari Anggaran Bank Indonesia (BI) Tahun 2012;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp444.570.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Harga BPS; dan
 - BPS bertugas: melaksanakan kegiatan perolehan Data Inflasi dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) tahun 2012.

- a) Melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyediaan Data Inflasi dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Tahun 2012, penghitungan diagram timbang IHPB (2010=100) serta mengumumkan *core inflation*, *volatile*, dan *administered price*, sesuai dengan KAK dan RAB yang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Moneter-Bank Indonesia;
 - b) Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan; dan
 - c) Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Moneter-Bank Indonesia.
- 2) Perolehan Data Inflasi dan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Tahun 2012;
- Perjanjian kerja sama nomor 14/I/DSM tanggal 4 Januari 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan dari Anggaran Bank Indonesia (BI) Tahun 2012;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp871.140.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 4 Januari sampai dengan Desember 2012 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Harga BPS; dan
 - BPS bertugas:
 - a) Melakukan penghitungan dan penyediaan data disagregasi inflasi (*core*, *volatile* dan *administered price*) secara bulanan dalam tahun 2012 untuk data bulanan (m-t-m), tahun kalender (y-t-d), dan tahunan (y-o-y) dalam bentuk *softcopy*, termasuk kegiatan pembahasan/evaluasi dan supervisi validitas dalam rangka perhitungan data disagregasi inflasi;
 - b) Melakukan penghitungan dan penyediaan data Nilai Konsumsi (NK) dan data Indeks Harga Konsumen (IHK) per komoditi Nasional secara bulanan tahun 2012 dalam bentuk *softcopy*;
 - c) Penghitungan dan penyediaan data Nilai Konsumsi (NK) dan data Indeks Harga Konsumen (IHK) per komoditi per kota secara bulanan tahun 2012 dalam bentuk *softcopy*; dan
 - d) Melakukan penghitungan dan penyediaan data Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) perkomoditi Nasional secara bulanan tahun 2012 dalam bentuk *softcopy* termasuk pembahasan/evaluasi dalam rangka perhitungan IHPB.
- k. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).
- Perjanjian kerja sama nomor 282C/SPK/01.01.01/KOORD/08/2012 dan nomor 20/KS/29.VIII/2012 tentang Penyelenggaraan *Baseline* Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012;

- Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Waktu pelaksanaan adalah 5 (lima) bulan dihitung sejak Agustus 2012 sampai dengan Desember 2012 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - Sumber pendanaan pelaksanaan dibebankan pada DIPA Satker Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2012;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp1.950.000.000;
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial BPS; dan
 - BPS bertugas:
 - i. Melakukan kegiatan perencanaan, pengawasan, pembiayaan dan pengelolaan administrasi keuangan Penyelenggaraan *Baseline* Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2012;
 - ii. Mempertanggung jawabkan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam rangka kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan *Baseline* Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2012;
 - iii. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat berita acara perubahan yang disepakati dan disahkan oleh para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum melaksanakan kegiatan apabila diperlukan perubahan atas Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Pelaporan pelaksanaan Penyelenggaraan *Baseline* Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Tahun 2012 yang disusun oleh BPS disampaikan ke pada BAPPENAS selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2013 atau sesuai kesepakatan para pihak.
- I. Universitas Indonesia (UI).
- 1) Program Studi Kajian Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Angkatan III Tahun 2012/2013;
 - Perjanjian kerja sama nomor 30/KS/27-VIII/2012 dan nomor 257/PKS/WR/II/UI/2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Program Magister (S2) Program Studi Kajian Kependudukan Dan Ketenagakerjaan Angkatan III Tahun 2012/2013 tanggal 27 Agustus 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan kegiatan dari DIPA BPS dan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur Keuangan Negara yang berlaku akan dibayarkan ke Universitas Indonesia untuk biaya pendidikan;
 - Nilai kerja sama Rp970.900.000,- yang pembayarannya dilakukan pada:
 - i. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp500.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Desember 2012;

- ii. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp319.000.000;
 - 1. Rp159.500.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2013;
 - 2. Rp159.500.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2013;
 - iii. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp151.900.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2014.
- Lingkup perjanjian kerja sama adalah pendidikan program pascasarjana (S2) pada Universitas Indonesia untuk 19 (sembilan belas) PNS BPS yang diberikan beasiswa tugas belajar;
 - Waktu pelaksanaan secara keseluruhan 4 (empat) semester dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung mulai tanggal 3 September 2012 (Gasal 2012/2013) sampai dengan Agustus 2014;
 - Penanggung jawab kegiatan Program Studi Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Angkatan III Tahun 2012/2013 Universitas Indonesia;
 - Apabila ada peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu yang ditentukan, maka peserta didik akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya; dan
 - BPS bertugas:
 - a) Menanggung biaya pendidikan peserta didik;
 - b) Menaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.
- 2) Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Tahun 2012;
- Perjanjian kerja sama nomor 37/KS/27-VIII/2012 dan nomor 275/PKS/WR/II/UI/2012 tentang Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan kegiatan dari DIPA BPS dan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur Keuangan Negara yang berlaku akan dibayarkan ke UI untuk biaya pendidikan;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp271.500.000,- yang pembayarannya dilakukan :
 - i Tahun Anggaran 2012 dibebankan pada DIPA 0001/054-01.1.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp90.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Desember 2012;
 - ii Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp70.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2013;
 - iii Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp50.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2014;

- iv Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp40.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2015;
- v Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp21.500.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2016.
- Waktu pelaksanaan kerja sama secara keseluruhan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan selama 8 (delapan) semester terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012;
- Lingkup perjanjian kerja sama ini adalah S3 PPIE dari Universitas Indonesia yang dibagikan kepada 2 (dua) PNS BPS yang mendapatkan beasiswa tugas belajar;
- Penanggung jawab kegiatan adalah Program Doktor (S3) Universitas Indonesia;
- Apabila selama pelaksanaan pendidikan terjadi pengurangan jumlah peserta didik, maka jumlah pembayaran akan dilakukan perhitungan ulang oleh para pihak; dan
- BPS bertugas:
 - a) Memberikan informasi atas kebijakan BPS di bidang pendidikan yang berhubungan dengan peserta didik;
 - b) Memberikan informasi tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan peserta didik;
 - c) Menanggung biaya pendidikan peserta didik.
- m. Institut Pertanian Bogor (IPB).
 - 1) Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Dan Program Studi Statistika Tahun 2012;
 - Perjanjian kerja sama nomor 32/KS/13-VIII/2012 dan nomor 13379/IT3.10/KP/2012 tentang Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Dan Program Studi Statistika Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan kegiatan dari DIPA BPS dan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur Keuangan Negara yang berlaku akan dibayarkan ke IPB untuk biaya pendidikan;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp243.600.000,- yang pembayarannya dilakukan pada :
 - a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp80.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Desember 2012;
 - b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp80.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Rp40.000.000 dibayarkan paling lambat 30 April 2013;

2. Rp40.000.000 dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2013;
 - c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp70.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 1. Rp35.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2014;
 2. Rp35.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2014;
 - d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp13.600.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2015;
- Lingkup perjanjian kerja sama adalah pendidikan Program Doktor (S3) program studi ilmu ekonomi pertanian (EPN) dan Program Studi Statistika IPB untuk 4 (empat) PNS BPS yang diberikan beasiswa tugas belajar;
 - Waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama dilaksanakan selama 6 (enam) semester, terhitung mulai Semester I (Ganjil) Tahun akademik 2012/2013 sampai dengan Semester VI (Genap) tahun akademik 2014/2015. Terhitung mulai September 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan adalah Program Doktor (S3) Institut Pertanian Bogor ;
 - Apabila ada peserta didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka peserta didik akan menanggung biaya penyelesaian studinya; dan
 - BPS bertugas:
 - a) Memberikan informasi atas kebijakan di BPS di bidang pendidikan yang berhubungan dengan peserta didik;
 - b) Memberikan informasi tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan peserta didik; dan
 - c) Menanggung biaya pendidikan peserta didik.
- 2) Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) dan Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan (PWD);
- Perubahan / *Addendum* atas perjanjian kerja sama nomor 31/KS/29-VIII/2009 dan nomor 6220a/13.10/PP/2009 menjadi nomor 36/KS/11-VI/2012 dan nomor 7847/IT3.10/PP/2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) dan Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan (PWD) tanggal 11 Juni 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan kegiatan dari DIPA BPS dan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur Keuangan Negara yang berlaku akan dibayarkan ke IPB untuk biaya pendidikan;

- Nilai kerja sama sebesar Rp414.800.000,- yang pembayarannya dilakukan pada:
 - i Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp74.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan November 2009
 - ii Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp90.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Maret 2010 sebesar Rp45.000.000,- dan bulan Agustus 2010 sebesar Rp45.000.000,-;
 - iii Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp124.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Maret 2011 sebesar Rp62.000.000,- dan bulan Agustus 2011 sebesar Rp62.000.000,-;
 - iv Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp114.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Maret 2012 sebesar Rp62.000.000,- dan pada bulan Desember tahun 2012 sebesar Rp52.000.000,- dan;
 - v Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp12.800.000,- dibayarkan paling lambat bulan April tahun 2013.
 - Waktu pelaksanaan kerja sama di ubah menjadi 8 (delapan) semester dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung mulai tahun ajaran 2009/2012 sampai dengan tahun ajaran 2012/2013
 - Penanggung jawab kegiatan adalah Program Doktor (S3) Institut Pertanian Bogor; dan
 - Apabila selama pelaksanaan pendidikan terjadi pengurangan jumlah peserta didik, maka jumlah pembayaran akan dilakukan perhitungan ulang oleh para pihak.
- n. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
- 1) Pendidikan Program Pascasarjana (S2) Program Studi Statistika Angkatan VI;
- Perjanjian kerja sama nomor 1117/IT2.1/KS.00.00/2012 dan nomor 33/KS/03-VII/2012 tentang Pendidikan Program Pascasarjana (S2) Program Studi Statistika Angkatan VI tanggal 3 Juli 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan kegiatan dari DIPA BPS dan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur Keuangan Negara yang berlaku akan dibayarkan ke ITS untuk biaya pendidikan;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp997.500.000,- yang pembayarannya di lakukan pada :
 - i. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp525.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Desember 2012;
 - ii. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp329.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Rp164.500.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2013

2. Rp164.500.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2013
 - iii. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp143.500.000,- dibayarkan paling lambat pada 30 April 2014.
- Waktu pelaksanaan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012, dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
 - Lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pendidikan program pascasarjana (S2) ITS tahun akademik 2012/2013 untuk 21 (dua puluh satu) PNS BPS yang diberi beasiswa tugas belajar;
 - Penanggung jawab kegiatan adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
 - Apabila ada peserta didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka peserta didik akan menanggung biaya penyelesaian studinya; dan
 - BPS bertugas:
 - a) Menanggung biaya pendidikan peserta didik sebagaimana sebelumnya disebutkan;
 - b) Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan ITS.
- 2) Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Statistika Angkatan III;
- Perjanjian kerja sama nomor 1118/IT2.1/KS.00.00/2012 dan nomor 34/KS/03 VII/2012, tentang Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Statistika Angkatan III tanggal 3 Juli 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan kegiatan dari DIPA BPS dan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur Keuangan Negara yang berlaku akan dibayarkan ke ITS untuk biaya pendidikan;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp280.000.000,- yang pembayarannya dilakukan pada:
 - i. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp80.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan November 2012;
 - ii. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp80.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 1. Rp40.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2013;
 2. Rp40.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2013;
 - iii. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp80.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp40.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2014;
 2. Rp40.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2014;
- iv. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp40.000.000,- dibayarkan paling lambat pada tanggal 30 April 2015;
- Waktu pelaksanaan terhitung mulai 1 Juli 2012 dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
 - Lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pendidikan program doktor (S3) yang dibagikan untuk 2 (dua) PNS BPS yang diberikan beasiswa tugas belajar;
 - Penanggung jawab kegiatan adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
 - Apabila ada peserta didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka peserta didik akan menanggung biaya penyelesaian studinya; dan
 - BPS bertugas:
 - a) Menanggung biaya pendidikan peserta didik sebagaimana sebelumnya disebutkan;
 - b) Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan ITS.
- 3) Pendidikan Pascasarjana Jenjang Doktor (S3) Program Studi Statistika;
- Perubahan/*Addendum* atas perjanjian kerja sama nomor 28/KS/1-VII/2009 dan nomor 1526.1/I2.1/KS/2009 menjadi perjanjian kerja sama nomor 35/KS/11-VI/2012 dan nomor 2063/IT2.1/KS.00.00/2012 tentang Pendidikan Pascasarjana Jenjang Doktor (S3) Program Studi Statistika;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan kegiatan dari DIPA BPS dan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur Keuangan Negara yang berlaku akan dibayarkan ke ITS untuk biaya pendidikan;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp426.000.000,- yang pembayarannya dilakukan pada:
 - i Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp50.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Oktober 2009;
 - ii Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp90.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Februari 2010 sebesar Rp50.000.000,- dan bulan Oktober tahun 2010 sebesar Rp40.000.000,-;
 - iii Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp110.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Februari tahun 2011 sebesar Rp40.000.000,- dan bulan Oktober 2011 sebesar Rp70.000.000,-;

- iv Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp130.000.000,- dibayarkan paling lambat pada bulan Februari tahun 2012 sebesar Rp70.000.000,- dan pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp60.000.000,-;
 - v Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp46.000.000,- dibayarkan paling lambat bulan Februari tahun 2013;
 - Waktu pelaksanaan kerja sama diubah menjadi 8 (delapan) semester dalam waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung mulai 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2013;
 - Penanggung jawab kegiatan adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS); dan
 - Apabila selama pelaksanaan pendidikan terjadi pengurangan jumlah peserta didik, maka jumlah pembayaran akan dilakukan perhitungan ulang oleh para pihak.
- o. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Perjanjian kerja sama nomor HK.05.01.1/I.2/3158/2012 dan nomor 39/KS/16-IV/2012 tentang Riset Kesehatan Dasar Tahun 2012-2014 tanggal 16 April 2012;
 - Sumber pendanaan kerja sama ini dari DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014;
 - Ruang lingkup kerja sama ini memberikan kuasa kepada pihak BPS agar menyusun metode sampling Riskesdas Tahun 2012-2014;
 - Pembayaran untuk kerja sama ini dilakukan oleh pihak pertama melalui pembayaran langsung atas usulan pihak kedua, dan paling lambat dilaksanakan 10 (sepuluh) hari setelah usulan pihak kedua diterima oleh pihak kesatu;
 - Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS; dan
 - BPS bertugas:
 - a) Menyusun desain sampling;
 - b) Menyusun kerangka sampel dan pemilihan blok sensus;
 - c) Melakukan penghitungan penimbangan untuk tingkat kabupaten, provinsi dan nasional; dan
 - d) Melakukan perhitungan sampling error.
- p. Lembaga Ronny F Pronodirdjo and Associate.
- Perjanjian kerja sama nomor 25/KS/26-IX/2012 dan nomor 58/PNLP/IX/2012 tentang Pelatihan *Licensed NLP Practitioner* tanggal 26 September 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;

- Sumber pendanaan dari DIPA Badan Pusat Statistik Nomor: 0001/054-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011, kode MAK 2833.011.521219;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp13.500.000;
 - Waktu pelaksanaan terhitung sejak 6 Oktober sampai dengan 12 Oktober 2012;
 - Penanggung jawab kegiatan ini Lembaga Ronny F Pronodirdjo and Associate;
- q. Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Papua Provinsi Papua.
- Perjanjian kerja sama nomor 415.4b-420.1/260/BP.SDM.P/2012 dan nomor 18/KS/02-III/2012 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Papua tanggal 2 Maret 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp138.550.000;
 - Waktu pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama oleh para pihak sampai dengan 31 Desember 2012;
 - Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang berasal dari Provinsi Papua, yang meliputi:
 - a. Matrikulasi untuk 6 (enam) mahasiswa; dan
 - b. Pendampingan selama pendidikan untuk 6 (enam) mahasiswa.
 - Penanggung jawab kegiatan ini Sekolah Tinggi Ilmu Statistik; dan
 - STIS bertugas menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang berasal dari Papua, dengan kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan Perjanjian ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- r. Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Bina Marga).
- Perjanjian kerja sama nomor PA0204-Bt.01/PTJIn/01.82/02100.034 tanggal 27 April 2012 tentang Pendataan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ);
 - Bentuk kerja sama PNBK;
 - Sumber pendanaan dari APBN (DIPA Satuan kerja Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum TA 2012);
 - Nilai kerja sama sebesar Rp3.250.000.000;
 - Waktu pelaksanaan mulai tanggal 27 April sampai dengan tanggal 28 September 2012 (155 hari);
 - Penanggung jawab kegiatan Biro Bina Program BPS; dan
 - BPS bertugas melaksanakan kegiatan Pendataan SHBJ di tingkat provinsi di Indonesia, yang meliputi menyiapkan kuesioner untuk pelaksanaan pendataan SHBJ, membuat buku pedoman pendataan SHBJ, melakukan pelatihan

petugas lapangan pendataan SHBJ, pilot pendataan SHBJ, pengumpulan data pendataan SHBJ, pengolahan data hasil pendataan SHBJ, dan pelaporan pendataan SHBJ.

- s. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 - Perjanjian kerja sama Nomor 507/-072.26 dan Nomor 31000.008 Tentang Penyusunan Data Statistik Daerah tanggal 4 Januari 2012;
 - Bentuk kerja sama Swakelola;
 - Sumber pendanaan berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Program Pengembangan Statistik Daerah;
 - Waktu pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan 1 (satu) tahun, sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2012;
 - Penanggung jawab BPS Provinsi DKI Jakarta; dan
 - BPS bertugas melaksanakan pekerjaan pengumpulan dan pengolahan data untuk Penyusunan Statistik Daerah.
- t. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 - Perjanjian kerja sama Nomor 050.13/134/IV/Bappeda dan Nomor 76000.008.2012 Tentang Penyusunan Data Statistik Daerah tanggal 30 April 2012;
 - Bentuk kerja sama PNBP;
 - Sumber pendanaan berasal dari DIPA BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2012;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp107.220.000;
 - Waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan berakhir tanggal 31 Desember 2012;
 - Penanggung jawab BPS Provinsi Sulawesi Barat; dan
 - BPS bertugas melaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyajian Database Sulawesi Barat Tahun 2012.
- u. World Bank
 - 1) Pengumpulan Data
 - Perjanjian kerja sama Nomor Kontrak 7164662;
 - Bentuk kerja sama PNBP;
 - Sumber pendanaan berasal World Bank;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp390.497.000;
 - Waktu pelaksanaan berakhir tanggal 31 Desember 2012;

2) PODES 2011

- Perjanjian kerja sama Nomor Kontrak 7164662;
 - Bentuk kerja sama PNBPNP;
 - Sumber pendanaan berasal World Bank;
 - Nilai kerja sama sebesar Rp3.242.455.069;
 - Waktu pelaksanaan berakhir tanggal 31 Desember 2012;
- v. Kerjasama antara Satker Sestama BPS dan Penyewa Kantin Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dengan:
- Nomor PKS 58/PNLP/IX/2012 tanggal 26 September 2012 dan 25/KS/26-IX/2012
 - Nilai perjanjian adalah Rp23.808.000
 - Bentuk kerja sama: PNBPNP

Rekapitulasi kerjasama dan Naskah Perjanjian Kerjasama secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran pada bagian lampiran LK ini.

5. Untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengelolaan keuangan di BPS agar sesuai dengan peraturan, BPS telah menerbitkan:
- a. Perka Nomor 1 Tahun 2012 tentang “Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0 (Nol Rupiah) terhadap Pihak Tertentu atas penerimaan bukan pajak yang berlaku pada BPS”, yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2012;
 - b. Perka Nomor 28 Tahun 2012 tentang “Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan Pusat Statistik”, yang ditetapkan pada tanggal 2 April 2012;
 - c. Perka Nomor 37 Tahun 2012 tentang “Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama dalam rangka Kegiatan Statistik, Teknologi Informasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Badan Pusat Statistik”, yang ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2012;
 - d. Perka Nomor 22 Tahun 2011 tentang “Pedoman Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara Terhadap Bendahara di Lingkungan Badan Pusat Statistik”, yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2011;
 - e. Perka Nomor 23 Tahun 2011 tentang “Pedoman Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik”, yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2011;
 - f. Perka Nomor 27 Tahun 2011 tentang “Biaya Standar Transport Perjalanan Dinas dari Lokasi Kantor Badan Pusat Statistik ke Bandara/Stasiun/Terminal Pulang Pergi”, yang ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2011;

6. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-52/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada 20 (Dua puluh) Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dimana BPS merupakan salah satu K/L yang mendapatkan tunjangan kinerja pada tahun 2012. Rincian realisasi tunjangan kinerja pegawai BPS Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Realisasi Tunjangan Kinerja Pegawai BPS Pusat dan Daerah
Tahun Anggaran 2012

No.	BPS Pusat/Provinsi	Nilai Tunjangan Kinerja (Rp)		
		Bruto	Pajak	Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BPS Pusat	56.272.075.501	3.779.226.310	52.492.849.191
2	Aceh	17.081.521.536	769.716.411	16.311.805.125
3	Sumatera Utara	24.800.254.485	1.165.927.170	23.634.327.315
4	Sumatera Barat	15.167.372.021	807.393.081	14.359.978.940
5	Riau	12.099.713.908	529.155.492	11.570.558.416
6	Jambi	10.494.020.770	504.739.460	9.989.281.310
7	Sumatera Selatan	14.114.801.347	680.568.320	13.434.233.027
8	Bengkulu	7.891.029.681	431.759.340	7.459.270.341
9	Lampung	13.546.267.541	652.502.794	12.893.764.747
10	Kepulauan Bangka Belitung	5.646.866.658	298.467.323	5.348.399.335
11	Kepulauan Riau	5.684.463.825	273.257.415	5.411.206.410
12	DKI Jakarta	8.063.959.593	479.179.443	7.584.780.150
13	Jawa Barat	34.016.056.454	1.622.317.345	32.393.739.109
14	Jawa Tengah	42.219.716.457	1.917.306.942	40.302.409.515
15	Di Yogyakarta	8.772.263.506	488.113.171	8.284.150.335
16	Jawa Timur	41.224.657.353	2.128.299.371	39.096.357.982
17	Banten	9.914.502.493	424.270.734	9.490.231.759
18	Bali	9.405.824.320	504.748.723	8.901.075.597
19	Nusa Tenggara Barat	10.212.750.738	522.289.215	9.690.461.523
20	Nusa Tenggara Timur	16.953.818.650	842.780.194	16.111.038.456
21	Kalimantan Barat	11.793.983.104	643.348.970	11.150.634.134
22	Kalimantan Tengah	9.957.704.471	548.361.292	9.409.343.179
23	Kalimantan Selatan	12.815.565.259	639.997.801	12.175.567.458
24	Kalimantan Timur	11.347.832.751	584.195.428	10.763.637.323
25	Sulawesi Utara	9.261.884.349	499.079.383	8.762.804.966
26	Sulawesi Tengah	9.687.988.045	470.106.327	9.217.881.718
27	Sulawesi Selatan	20.959.740.735	1.006.651.548	19.953.089.187
28	Sulawesi Tenggara	11.719.664.515	489.073.522	11.230.590.993
29	Gorontalo	5.496.990.737	281.510.642	5.215.480.095
30	Sulawesi Barat	5.887.951.498	274.185.383	5.613.766.115
31	Maluku	7.333.784.920	334.200.793	6.999.584.127
32	Maluku Utara	6.427.446.499	283.513.756	6.143.932.743
33	Papua Barat	8.230.925.511	432.321.776	7.798.603.735
34	Papua	14.046.888.370	673.026.692	13.373.861.678
	Jumlah	508.550.287.601	25.981.591.567	482.568.696.034

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1 ASET****C.1.1 Aset Lancar**

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp240.116.614

C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing – masing sebesar Rp240.116.614 dan Rp986.006.527. Jumlah tersebut merupakan saldo kas/bank yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Wilayah

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	63.625.574	304.725.133	(241.099.559)
2	Jawa Tengah	0	8.304.550	(8.304.550)
3	DI Yogyakarta	40	0	40
4	Jawa Timur	0	613.669	(613.669)
5	Aceh	0	7.990.622	(7.990.622)
6	Sumatera Utara	0	316.620.060	(316.620.060)
7	Riau	5.936.784	7.000	5.929.784
8	Sumatera Selatan	0	6.336.000	(6.336.000)
9	Lampung	11.543.425	244.229	11.299.196
10	Kalimantan Selatan	46.236.655	0	46.236.655
11	Kalimantan Timur	7.874.525	160.171.084	(152.296.559)
12	Sulawesi Utara	(1.571)	48.925.360	(48.926.931)
13	Sulawesi Tengah	4.284.000	44.550	4.239.450
14	Sulawesi Selatan	0	42.419.850	(42.419.850)
15	Maluku	800.000	0	800.000
16	Nusa Tenggara Timur	0	10.465.050	(10.465.050)
17	Papua	89.075.000	5.768	89.069.232
18	Bengkulu	2.246.200	15.338	2.230.862
19	Maluku Utara	0	76.951.710	(76.951.710)
20	Gorontalo	8.495.982	2.507.554	5.988.428
21	Kepulauan Riau	0	(341.000)	341.000

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah		240.116.614	986.006.527	(745.889.913)

Sedangkan saldo tersebut sudah disetor seluruhnya ke Kas Negara dan bukti setoran berupa SSBP terlampir. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang sudah disetor ke Kas Negara sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per Wilayah

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa Kas yang Belum Disetor ke Kas Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	63.625.574	63.625.574	0
2	DI Yogyakarta	40	40	0
3	Riau	5.936.784	5.936.784	0
4	Lampung	11.543.425	11.543.425	0
5	Kalimantan Selatan	46.236.655	46.236.655	0
6	Kalimantan Timur	7.874.525	7.874.525	0
7	Sulawesi Utara	(1.571)	(1.571)	0
8	Sulawesi Tengah	4.284.000	4.284.000	0
9	Maluku	800.000	800.000	0
10	Papua	89.075.000	89.075.000	0
11	Bengkulu	2.246.200	2.246.200	0
12	Gorontalo	8.495.982	8.495.982	0
Jumlah		240.116.614	240.116.614	0

Terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran minus yaitu sebesar Rp1.571. Saldo tersebut terdapat pada satker BPS Kota Manado pada wilayah Sulawesi Utara yang merupakan kelebihan setoran atas saldo UP Tahun 2012. Kelebihan setoran ini kemudian dilakukan reklasifikasi menjadi akun Pendapatan Lain-Lain (423999) berdasarkan nota perbaikan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Manado tanggal 31 Januari 2013.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp4.268.005*

C.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp4.268.005 dan Rp49.152. Jumlah Saldo Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini juga mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku Wajib Pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Saldo pada akun ini berasal dari transaksi – transaksi sebagai berikut:

1. Penjualan data dan publikasi sebesar Rp2.417.830 yang terdapat pada Satker Sestama, Wilayah Sumatera Selatan, dan Wilayah Sulawesi Utara.
2. Penerimaan jasa giro sebesar Rp10.575 yang terdapat pada Wilayah Sulawesi Barat.
3. Penerimaan atas sewa rumah dinas sebesar Rp1.839.600 yang terdapat pada wilayah Sumatera Selatan.

Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per Wilayah

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	1.655.830	49.152	1.606.678
2	Sumatera Selatan	2.381.600	0	2.381.600
3	Sulawesi Utara	220.000	0	220.000
4	Sulawesi Barat	10.575	0	10.575
Jumlah		4.268.005	49.152	4.218.853

Sedangkan saldo tersebut sudah disetor seluruhnya ke Kas Negara dan bukti setoran berupa SSBP terlampir. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang sudah disetor ke Kas Negara sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Penyetoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per Wilayah

No.	Wilayah	Saldo Kas (Rp)	Penyetoran Ke Kas Negara (Rp)	Sisa Kas yang Belum Disetor ke Kas Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	1.655.830	1.655.830	0
2	Sumatera Selatan	2.381.600	2.381.600	0
2	Sulawesi Utara	220.000	220.000	0
3	Sulawesi Barat	10.575	10.575	0
Jumlah		4.268.005	4.268.005	0

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp2.982.000.066*

C.1.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp2.982.000.066 dan Rp6.110.643.451. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP dan Bendahara Hibah, baik itu saldo yang merupakan saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per-Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Wilayah

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	1.155.746.455	5.900.671.138	(4.744.924.683)
2	DKI Jakarta	10.866.095	0	10.866.095
3	Jawa Barat	2.336.620	2.405.300	(68.680)
4	Jawa Tengah	20.025.692	293.043	19.732.649
5	DI Yogyakarta	40.929.343	0	40.929.343
6	Jawa Timur	4.205.908	271.445	3.934.463
7	Aceh	0	27.479.440	(27.479.440)
8	Sumatera Utara	15.129.975	0	15.129.975
9	Sumatera Barat	11.718.920	12.855.961	(1.137.041)
10	Riau	6.367.600	417.750	5.949.850
11	Sumatera Selatan	1.133.290	0	1.133.290
12	Lampung	7.504	0	7.504
13	Kalimantan Barat	18.028.800	0	18.028.800
14	Kalimantan Timur	5.017.587	0	5.017.587
15	Kalimantan Selatan	4.190.000	0	4.190.000
16	Sulawesi Utara	27.912.021	0	27.912.021
17	Sulawesi Tengah	25.305.026	0	25.305.026
18	Sulawesi Selatan	931.449.876	0	931.449.876
19	Sulawesi Tenggara	7.402.000	898.162	6.503.838
20	Maluku	350.950	0	350.950
21	Nusa Tenggara Timur	91.434.635	0	91.434.635
22	Papua	51.410.875	8.767.275	42.643.600
23	Bengkulu	531.595.616	0	531.595.616
24	Maluku Utara	138.066	140.896	(2.830)
25	Banten	0	155.127.200	(155.127.200)
26	Bangka Belitung	973.450	1.309.766	(336.316)
27	Gorontalo	17.859.840	6.075	17.853.765
28	Kepulauan Riau	463.922	0	463.922
Jumlah		2.982.000.066	6.110.643.451	(3.128.643.385)

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 terdiri dari:

Tabel 27
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan	Wilayah / Satker
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ekuitas Dana Lancar				
1	Hibah	447.485.755	Saldo Hibah yang belum di SP2HLkan pada TA 2012.	Sestama BPS
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		447.485.755		
Pendapatan Yang Ditangguhkan				
2	Tunjangan Kinerja	349.430.822	Pengembalian belanja Tunjangan Kinerja TA 2012 yang belum disetorkan ke Kas Negara.	Satker Sestama BPS, DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, NTT, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Kep. Riau, Bengkulu, dan Gorontalo.
3	Uang makan	12.793.975	Pengembalian belanja uang makan TA 2012 yang belum disetorkan ke Kas Negara.	Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sumatera Barat
4	Honorarium	546.000	Pengembalian belanja honorarium yang terkait dengan output kegiatan TA 2012 yang belum disetorkan ke Kas Negara.	Sumatera Barat.
5	Uang perjalanan dinas	350.950	Pengembalian belanja perjalanan dinas TA 2012 yang belum disetorkan ke Kas Negara.	Maluku.
6	Jasa giro	2.443.474	Pendapatan jasa giro TA 2012 yang belum disetorkan ke Kas Negara.	Jawa Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kep. Riau, dan NTT.
7	Pajak	1.633.837	Potongan pajak penghasilan TA 2012 yang belum disetorkan ke Kas Negara.	Kalimantan Timur.
Jumlah Pendapatan Yang Ditangguhkan		367.199.058		
Utang Kepada Pihak Ketiga				
1	Tunjangan Kinerja	1.480.027.956	Realisasi belanja Tunjangan Kinerja TA 2012 yang belum dibayarkan kepada pegawai.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu.
2	Uang Makan	678.557.700	Realisasi belanja uang makan TA 2012 yang belum dibayarkan kepada pegawai.	Satker Sestama BPS.
3	Honorarium	8.126.515	Realisasi belanja honorarium yang terkait dengan output kegiatan TA 2012 yang belum terbayar dan berada di Bendahara Pengeluaran.	Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu.
4	Sisa saldo Rekening	603.082	Sisa Rekening kerja sama Pusdatin Kementerian Pertanian.	Sumatera Barat.
Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga		2.167.315.253		
Jumlah		2.982.000.066		

Piutang Bukan Pajak
Rp89.793.732

C.1.1.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp89.793.732 dan Rp167.452.574. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang

dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan.

Saldo pada akun ini berasal dari transaksi – transaksi sebagai berikut:

1. Tagihan Sewa Rumah Dinas yang belum diterima dari pegawai terdapat pada Wilayah Maluku Utara sebesar Rp1.547.061.
2. Sisa angsuran kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang belum diterima dari pegawai terdapat pada Satker Sestama, Wilayah Sumatera Barat, dan Wilayah Kalimantan Timur sebesar Rp75.575.141, Rp4.260.000, dan Rp1.471.080.
3. Pengembalian kelebihan pembayaran uang makan yang belum diterima dari pegawai yang terdapat pada Wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Barat sebesar Rp676.600 dan Rp6.263.850.

Daftar saldo Piutang Bukan Pajak per-Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Piutang Bukan Pajak Per Wilayah

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	75.575.141	159.435.032	(83.859.891)
2	Jawa Tengah	676.600	0	676.600
3	Sumatera Barat	4.260.000	0	4.260.000
4	Kalimantan Barat	6.263.850	1.460.000	4.803.850
5	Kalimantan Timur	1.471.080	3.851.000	(2.379.920)
6	Papua	0	739.380	(739.380)
7	Maluku Utara	1.547.061	1.967.162	(420.101)
	Jumlah	89.793.732	167.452.574	(77.658.842)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan
Pajak
(Rp448.968)

C.1.1.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar (Rp448.968) dan (Rp837.263). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing – masing Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per-Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Per Wilayah

Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sestama	Lancar	75.575.141	0,50	377.876
Jawa Tengah	Lancar	676.600	0,50	3.383
Sumatera Barat	Lancar	4.260.000	0,50	21.300
Kalimantan Barat	Lancar	6.263.850	0,50	31.319

Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalimantan Timur	Lancar	1.471.080	0,50	7.355
Maluku Utara	Lancar	1.547.061	0,50	7.735
Jumlah		89.793.732		448.968

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp16.452.257.474

C.1.1.6 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp16.452.257.474 dan Rp362.276.673. Saldo ini merupakan nilai tagihan TP/TGR yang jatuh tempo sampai dengan tahun 2012 dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 06 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentang Akuntansi Piutang bahwa Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang dibukukan ke dalam Neraca merupakan bagian dari Aset Lancar, sedangkan sisanya dibukukan ke dalam Tagihan TP/TGR pada Piutang Jangka Panjang. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2012 merupakan saldo dari debitor yang dikenakan TP/TGR melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Pembebanan TGR (SPTGR) serta reklasifikasi saldo akun Aset Lain-Lain yang menjadi Bagian Lancar TP/TGR yaitu debitor TP/TGR yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL dan debitor yang sedang dalam proses penetapan TP/TGR melalui Surat Pemberitahuan Ganti Kerugian (SPGR).

Reklasifikasi debitor TP/TGR yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL ke dalam piutang lancar yaitu akun Bagian Lancar TP/TGR karena memiliki jatuh tempo sebelum tahun 2012 dan akan dilakukan penagihannya selama 12 (dua belas) bulan ke depan. Sedangkan debitor yang masih dalam proses penetapan TP/TGR diklasifikasikan ke dalam piutang lancar yaitu akun Bagian Lancar TP/TGR karena telah timbulnya hak tagih atas kewajiban debitor untuk mengganti kerugian negara melalui Surat Pemberitahuan Ganti Kerugian (SPGR) dan diharapkan penagihannya selama 12 (dua belas) bulan ke depan.

Daftar saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per-Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	16.452.257.474	362.276.673	16.089.980.801
Jumlah		16.452.257.474	362.276.673	16.089.980.801

Adapun mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011, Awal	Rp 362.276.673
Mutasi Tambah:	
Penambahan Tagihan TP/TGR s.d Des 2012	Rp 23.383.419
Reklasifikasi Piutang Jangka Panjang ke Bagian Lancar	Rp 20.583.583
Reklasifikasi Aset Lain – Lain ke Bagian Lancar	Rp 16.186.501.067
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 16.230.468.069

Mutasi Kurang:	
Pelunasan Tagihan TP/TGR s.d Des 2012	(Rp 140.487.268)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp 140.487.268)
Kenaikan / (Penurunan)	Rp16.089.980.801
Saldo per 31 Desember 2012, Akhir	Rp16.452.257.474

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah yang sebesar Rp23.383.419 merupakan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang terjadi selama tahun 2012 sejumlah 3 orang pada Satker Sestama BPS yaitu Ika Kartika, BST; Siti Solehah; dan Martin Suanta, SE.
- Mutasi tambah yang sebesar Rp20.583.583 merupakan reklasifikasi Tagihan TP/TGR dari klasifikasi Piutang Jangka Panjang menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sejumlah 7 orang pada Satker Sestama BPS.
- Mutasi tambah yang sebesar Rp16.186.501.067 merupakan reklasifikasi Tagihan TP/TGR dari klasifikasi Aset Lain - Lain menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR atas Tagihan TP/TGR yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL sebesar Rp13.172.140.267 dan Tagihan TP/TGR yang masih dalam proses penetapan TP/TGR sebesar Rp3.014.360.800.
- Mutasi kurang yang sebesar Rp140.487.268 merupakan hasil pelunasan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang terjadi selama tahun 2012 untuk sejumlah 25 orang pada Satker Sestama BPS.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Rp16.190.794.280)

C.1.1.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar (Rp16.190.794.280) dan (Rp80.644.009). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing – masing Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per-Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah

Wilayah	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Sestama	SKTJM dan Surat Pembebanan TGR	Lancar	56.295.302	0,50	281.477	
		Kurang Lancar	74.272.044	10	7.427.205	
		Diragukan	135.189.061	50	67.594.531	
		Macet	0	100	0	
	Sub Jumlah			265.756.407		75.303.213
	Debitur masih dalam proses penetapan TP/TGR (Surat Pemberitahuan Ganti	Lancar	0	0,50	0	
		Kurang Lancar	78.900.000	10	7.890.000	
		Diragukan	0	50	0	
		Macet	2.935.460.800	100	2.935.460.800	

Wilayah	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kerugian/SPGR)				
		Sub Jumlah	3.014.360.800		2.943.350.800
	TP/TGR yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL	Lancar	0	0,50	0
		Kurang Lancar	0	10	0
		Diragukan	0	50	0
		Macet	13.172.140.267	100	13.172.140.267
		Sub Jumlah	13.172.140.267		13.172.140.267
		Jumlah	16.452.257.474		16.190.794.280

Penjelasan kualitas Piutang atas akun Bagian Lancar TP/TGR yang berasal dari debitur yang masih dalam proses penetapan TP/TGR adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Kurang Lancar sebesar Rp78.900.000 dengan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp7.890.000 merupakan Piutang TP/TGR yang terjadi di tahun 2012 dan akan diharapkan pelunasannya 12 (dua belas) bulan ke depan. Piutang tersebut berasal dari 5 debitur dengan rincian adalah sebagai berikut:
 - a. Aidil Rizal S.Hum dan Agung Eriyanto, A.Md berdasarkan SPGR tanggal 23 Juli 2012 dengan total Piutang Rp50.000.000 dengan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp5.000.000.
 - b. Aloysius Maan, R Dudung Abdul Hakim, SE, dan Endang Rukmana Bin Suwita berdasarkan SPGR tanggal 19 Oktober 2011 dengan masing – masing nilai Rp13.400.000, Rp9.300.000, dan Rp6.200.000 dengan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih masing – masing sebesar Rp1.340.000, Rp930.000, dan Rp620.000.
2. Kualitas Piutang Macet sebesar Rp2.935.460.800 dengan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp2.935.460.800 berasal dari 4 debitur dengan rincian adalah sebagai berikut:
 - a. Dian Amrita Dewi, Igg Maha Adi Wijaya, dan Iman Hidayat masing – masing nilainya adalah Rp1.708.471.200, Rp353.920.000, dan Rp328.640.000 dengan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih masing – masing adalah Rp1.708.471.200, Rp353.920.000, dan Rp328.640.000. Ketiga debitur tersebut nilai Piutang berupa biaya pendidikan yang sampai saat ini belum ada penetapan biayanya dari BPPT berdasarkan SPTGR tanggal 19 Juni 2006.
 - b. Amang Surya Sukasih, nilai Piutang sebesar Rp544.429.600 dengan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp544.429.600. Nilai tersebut berdasarkan SPTGR tanggal 24 November 2006.

Belanja Dibayar
Dimuka (*prepaid*)
Rp322.971.666

C.1.1.8 Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp322.971.666 dan Rp380.530.268. Saldo ini merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan.

Saldo pada akun ini berasal dari transaksi – transaksi sebagai berikut:

1. Pengeluaran belanja untuk sewa kantor yang dibayar dimuka sebesar Rp322.725.891 yang terdapat pada Wilayah Sumatera Utara, Riau, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Riau.
2. Sisa saldo listrik pra-bayar yang belum digunakan yang terdapat pada wilayah Sulawesi Utara sebesar Rp245.775.

Daftar saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per-Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) Per Wilayah

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Sumatera Utara	36.157.534
2	Riau	40.000.000
3	Lampung	5.000.000
4	Kalimantan Timur	14.671.233
5	Sulawesi Utara	245.775
6	Sulawesi Tengah	2.500.000
7	Sulawesi Selatan	70.458.632
8	Sulawesi Tenggara	11.000.000
9	Nusa Tenggara Timur	83.333.333
10	Kepulauan Riau	59.605.159
Jumlah		322.971.666

Uang Muka Belanja (prepayment)
Rp0

C.1.1.9 Uang Muka Belanja (*prepayment*)

Saldo Uang Muka Belanja (*prepayment*) per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp96.420.621. Sama halnya dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka, saldo ini merupakan pengeluaran satuan kerja yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja. Sampai dengan per 31 Desember 2012 tidak terdapat saldo Uang Muka Belanja (*prepayment*) pada Neraca.

Persediaan
Rp18.257.177.113

C.1.1.10 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp18.257.177.113 dan Rp18.293.548.809. Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp18.257.177.113 diperoleh dari hasil inventarisasi fisik persediaan dengan dilengkapi dengan Berita Acara *Stock Opname*, terdiri dari:

Tabel 33
Rincian Persediaan

Kode	Uraian	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
117111	Barang Konsumsi	12.671.052.114	11.476.664.824
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	180.903.264	330.648.010
117114	Suku Cadang	3.289.800	764.000
117121	Pita Cukai, Materai, dan Leges	160.000	295.000
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kpd masyarakat	2.209.500.826	2.571.514.625
117127	Aset Lain-lain untuk diserahkan kpd masyarakat	24.520.936	3.008.000
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kpd masyarakat	1.930.848.271	2.527.006.209
117131	Bahan Baku	3.803.200	2.365.800
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	1.220.581.964	1.362.235.241
117199	Persediaan Lainnya	12.516.738	19.047.100
Jumlah		18.257.177.113	18.293.548.809

C.1.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing adalah sebesar Rp2.744.090.977.197 dan Rp2.476.962.548.621. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Penilaian Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara. Penilaian Aset Tetap dapat berupa biaya perolehan, biaya standar, dan nilai wajar. Sedangkan dalam penilaian kembali (revaluasi) Aset Tetap, pihak yang melakukan penilaian kembali adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan efektif berlaku pada saat berita acara penilaian kembali ditandatangani.

Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 34
Rincian Aset Tetap

Uraian	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	607.568.536.649	538.270.175.770	69.298.360.879
Peralatan Mesin	880.035.421.039	781.344.735.333	98.690.685.706
Gedung & Bangunan	1.161.270.740.143	1.083.370.186.839	77.900.553.304
Jalan,Irigasi,Jaringan	19.663.199.850	17.646.163.934	2.017.035.916
Aset Tetap Lainnya	28.465.852.027	24.172.331.665	4.293.520.362
KDP	47.087.227.489	32.158.955.080	14.928.272.409
Jumlah	2.744.090.977.197	2.476.962.548.621	267.128.428.576

Posisi Aset Tetap pada Neraca dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 35
Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN
Per 31 Desember 2012

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	607.568.536.649	607.568.536.649	0
Peralatan Mesin	880.035.421.039	880.035.421.039	0
Gedung & Bangunan	1.161.270.740.143	1.161.270.740.143	0
Jalan,Irigasi,Jaringan	19.663.199.850	19.663.199.850	0
Aset Tetap Lainnya	28.465.852.027	28.465.852.027	0
KDP	47.087.227.489	47.087.227.489	0
Jumlah	2.744.090.977.197	2.744.090.977.197	0

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan nilai masing-masing jenis Aset Tetap dikarenakan adanya mutasi serta hubungannya dengan belanja modal, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian selanjutnya.

Tanah

Rp607.568.536.649

C.1.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2012 adalah Rp607.568.536.649 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp538.270.175.770.

Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Aset Tetap Tanah

Saldo per 31 Desember 2011, Awal

Rp 538.270.175.770

Penambahan

Penambahan Saldo Awal	Rp	4.509.508.341
Pembelian	Rp	58.970.471.900
Transfer Masuk	Rp	3.056.136.000
Hibah (Masuk)	Rp	2.299.949.560
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	4.981.476.000
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke AT	Rp	186.600.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	10.232.357.930
Pengembangan Nilai Aset	Rp	791.404.250
Pengembangan Melalui KDP	Rp	676.559.750
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	6.079.061.550
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	49.500.000
Koreksi Pencatatan	Rp	76.650.000
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp	1.130.101.250
Total Penambahan	Rp	93.039.776.531

Pengurangan

Transfer keluar	(Rp)	3.020.476.000
Penghapusan	(Rp)	1.651.415.075
Hibah (keluar)	(Rp)	14.908.000
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	12.136.436.930
Koreksi Pencatatan	(Rp)	3.481.155.156
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	186.600.000

Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(Rp	3.250.424.491)	
Total Pengurangan	(Rp	23.741.415.652)	
Kenaikan / (Penurunan)			Rp 69.298.360.879
Saldo per 31 Desember 2012, Akhir			Rp 607.568.536.649

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

531111	Belanja Modal Tanah	Rp	65.135.166.900
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	Rp	43.500.000
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	Rp	15.000.000
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	Rp	183.580.000
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	Rp	1.100.000
	Jumlah	Rp	65.378.346.900

Mutasi Aset yang dipengaruhi oleh realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Pembelian	Rp	58.970.471.900
Pengembangan Nilai Aset	Rp	791.404.250
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	4.981.476.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp	676.559.750
	Jumlah	Rp 65.419.911.900

Adapun perbedaan mutasi nilai aset Tanah dibandingkan dengan belanja modal Tanah sebesar Rp41.565.000 dikarenakan adanya belanja modal tanah yang nilainya menambah akun Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar (Rp49.500.000) dan adanya belanja modal atas Gedung dan Bangunan yang nilainya menambah pada akun aset Tanah yaitu sebesar Rp91.065.000.

Peralatan dan
Mesin

Rp880.035.421.039

C.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 adalah Rp880.035.421.039 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp781.344.735.333.

Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2011, Awal		Rp 781.344.735.333
Penambahan		
Penambahan Saldo Awal	Rp	2.118.945.114
Pembelian	Rp	109.620.962.367
Transfer Masuk	Rp	118.494.292.242
Hibah (Masuk)	Rp	967.456.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	7.766.350.196
Perolehan Lainnya	Rp	14.900.000
Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp	2.932.000
Pembatalan Penghapusan	Rp	6.858.600
Reklasifikasi Masuk	Rp	12.348.097.717
Pengembangan Nilai Aset	Rp	883.829.311
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke AT	Rp	851.342.343
Perolehan Reklasifikasi dr Intra ke Ekstra	Rp	120.514.423
Koreksi Pencatatan	Rp	151.160.200
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp	109.847.436
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	2.744.363.445
Total Penambahan	Rp	256.201.851.394
Pengurangan		
Penghapusan	(Rp	1.936.098.940)

Transfer keluar	(Rp 118.769.163.887)	
Hibah (Keluar)	(Rp 310.274.580)	
Reklasifikasi Keluar	(Rp 4.994.216.963)	
Koreksi Pencatatan	(Rp 1.012.606.412)	
Penghapusan Semu karena reklas dari Intra ke Ekstra	(Rp 1.830.265)	
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(Rp 5.540.000)	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp 25.237.780.681)	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	(Rp 709.442.488)	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(Rp 4.534.211.472)	
Total Pengurangan	(Rp 157.511.165.688)	
Kenaikan / (Penurunan)		Rp 98.690.685.706
Saldo per 31 Desember 2012, Akhir		Rp 880.035.421.039

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 83.765.013.029
532121	Belanja Penambah Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 45.072.000
	Jumlah	Rp 83.810.085.029

Mutasi Aset yang dipengaruhi oleh realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Pembelian	Rp 109.620.962.367
Pengembangan Nilai Aset	Rp 883.829.311
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 7.766.350.196
Jumlah	Rp 118.271.141.874

Adapun perbedaan mutasi nilai Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan belanja modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp34.461.056.845. Hal ini disebabkan adanya belanja modal Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Lainnya, dan belanja barang yang menambah akun Peralatan dan Mesin serta belanja modal Peralatan dan Mesin yang nilainya menambah akun Aset Tak Berwujud, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Gedung dan Bangunan
Rp1.161.270.740.143

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 adalah Rp1.161.270.740.143 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.083.370.186.839.

Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo per 31 Desember 2011, Awal		Rp 1.083.370.186.839
Penambahan		
Penambahan Saldo Awal	Rp 993.573.850	
Pembelian	Rp 660.206.000	
Transfer Masuk	Rp 2.412.660.800	
Hibah (Masuk)	Rp 3.293.936.000	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 70.264.565.913	
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp 337.946.950	
Koreksi Pencatatan	Rp 137.000.000	
Reklasifikasi Masuk	Rp 9.773.134.904	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 363.463.000	
Pengembangan Nilai Aset	Rp 8.014.114.697	

Reklasifikasi dari Aset lainnya ke AT	Rp	20.823.475.700	
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra	Rp	1.387.553.160	
Pengembangan Melalui KDP	Rp	30.779.421.267	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp	625.886.850	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	15.086.230.123	
Total Penambahan	Rp	164.953.169.214	
Pengurangan			
Penghapusan	(Rp)	6.279.019.450	
Transfer keluar	(Rp)	2.589.072.900	
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	12.508.895.896	
Koreksi Pencatatan	(Rp)	3.331.872.550	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	(Rp)	17.573.518.000	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(Rp)	19.052.983.169	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	25.717.253.945	
Total Pengurangan	(Rp)	87.052.615.910	
Kenaikan / (Penurunan)			Rp 77.900.553.304
Saldo per 31 Desember 2012, Akhir			Rp 1.161.270.740.143

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	93.926.187.239
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja & Honor Pengelola Teknis Gedung & Bangunan	Rp	141.955.000
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung & Bangunan	Rp	4.000.000
533115	Belanja Modal Perencanaan & Pengawasan Gedung & Bangunan	Rp	741.190.350
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung & Bangunan	Rp	3.600.000
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung & Bangunan	Rp	86.435.000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung & Bangunan	Rp	30.779.421.267
	Jumlah	Rp	125.728.810.949

Mutasi Aset yang dipengaruhi oleh realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Pembelian	Rp	660.206.000
Pengembangan Nilai Aset	Rp	8.014.114.697
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	363.463.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	70.264.565.913
Pengembangan Melalui KDP	Rp	30.779.421.267
Jumlah	Rp	110.081.770.877

Adapun perbedaan mutasi nilai aset Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar (Rp15.647.040.072) karena adanya belanja modal Gedung dan Bangunan yang nilainya menambah pada akun Aset Tetap dalam Renovasi, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, KDP, Peralatan dan Mesin, dan Tanah. Selain itu terdapat juga penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang berasal dari belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Lainnya, Peralatan dan Mesin, dan belanja barang.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp19.663.199.850

C.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2012 adalah Rp19.663.199.850 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp17.646.163.934.

Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo per 31 Desember 2011, Awal		Rp 17.646.163.934
Penambahan		
Penambahan Saldo Awal	Rp 794.260	
Pembelian	Rp 771.560.460	
Transfer Masuk	Rp 2.500.000	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 132.883.000	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 18.500.000	
Pengembangan Nilai Aset	Rp 86.951.000	
Reklasifikasi Masuk	Rp 1.313.195.999	
	Rp 2.326.384.719	
Total Penambahan		
Pengurangan		
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp 94.292.910)	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(Rp 9.000)	
Koreksi Pencatatan	(Rp 34.164.000)	
Reklasifikasi Keluar	(Rp 180.882.893)	
	(Rp 309.348.803)	
Total Pengurangan		
Kenaikan / (Penurunan)		Rp 2.017.035.916
Saldo per 31 Desember 2012, Akhir		Rp 19.663.199.850

Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

534131	Belanja Modal Jaringan		Rp 11.379.885.913
		Jumlah	Rp 11.379.885.913

Mutasi Aset yang dipengaruhi oleh realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Pembelian	Rp 771.560.460
Pengembangan Nilai Aset	Rp 86.951.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 18.500.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 132.883.000
	Jumlah Rp 1.009.894.460

Adapun perbedaan antara mutasi aset yang dipengaruhi oleh realisasi belanja dengan nilai realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebesar (Rp10.369.991.453). Nilai tersebut merupakan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan, Lainnya, dan Peralatan dan Mesin yang menambah nilai akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang menambah akun Gedung dan Bangunan dan Peralatan dan Mesin.

Aset Tetap Lainnya
Rp28.465.852.027

C.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 adalah Rp28.465.852.027 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp24.172.331.665. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 mengenai Aset Tetap bahwa Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang termasuk kelompok Aset Tetap Lainnya menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.06/2011 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara (BMN) adalah bahan perpustakaan, barang bercorak

kesenian/kebudayaan/ olahraga, peralatan olahraga, hewan, ikan, tanaman, dan Aset Tetap dalam Renovasi.

Adapun aset pada BPS yang masuk pada kelompok Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Keterangan	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	71.316.302
2	Aset Tetap Lainnya	28.394.535.725
Jumlah		28.465.852.027

Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya

Saldo per 31 Desember 2011, Awal	Rp 24.172.331.665
Penambahan	
Pembelian	Rp 472.795.645
Penambahan Saldo Awal	Rp 241.484.473
Transfer Masuk	Rp 1.832.386.354
Reklasifikasi Masuk	Rp 111.679.090
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 71.316.302
Perolehan Lainnya	Rp 2.299.506.529
Hibah (Masuk)	Rp 10.877.000
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke AT	Rp 417.000
Pengembangan Nilai Aset	Rp 69.600.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp 1.691.234
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	Rp 43.194.704
Total Penambahan	Rp 5.154.948.331
Pengurangan	
Reklasifikasi Keluar	(Rp 106.306.461)
Transfer Keluar	(Rp 472.730.326)
Penghapusan	(Rp 175.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp 86.241.233)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	(Rp 41.348.910)
Koreksi Pencatatan	(Rp 115.101.583)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(Rp 39.524.456)
Total Pengurangan	(Rp 861.427.969)
Kenaikan / (Penurunan)	Rp 4.293.520.362
Saldo per 31 Desember 2012, Akhir	Rp 28.465.852.027

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

536111	Belanja Modal Lainnya	Rp 137.300.122.126
Jumlah		Rp 137.300.122.126

Mutasi Aset yang dipengaruhi oleh realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Pembelian (Aset Tetap Lainnya)	Rp 472.795.645
Pembelian (Aset Tak Berwujud)	Rp 113.130.085.144
Pengembangan Nilai Aset	Rp 69.600.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 71.316.302
Jumlah	Rp 113.743.797.091

Adapun perbedaan antara mutasi aset yang dipengaruhi oleh realisasi belanja dengan nilai realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud adalah sebesar (Rp23.556.325.035). Nilai tersebut merupakan realisasi belanja Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan belanja barang yang menambah nilai akun Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud, serta belanja modal lainnya yang menambah akun Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Peralatan dan Mesin.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp47.087.227.489

C.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 adalah Rp47.087.227.489 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp32.158.955.080. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 08 mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan paragraf 5, menyebutkan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar tentang KDP ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga. Adapun KDP dalam laporan keuangan ini pencatatan sebesar biaya perolehannya.

Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo per 31 Desember 2011, Awal		Rp 32.158.955.080
Penambahan		
Saldo Awal	Rp 43.600.000	
Perolehan/Penambahan	Rp 15.415.423.023	
Pengembangan	Rp 114.152.210.382	
Koreksi Nilai	(Rp 10.987.320)	
Penghapusan/Penghentian	(Rp 7.900.000)	
Transfer Masuk	Rp 69.282.000	
Transfer Keluar	(Rp 69.282.000)	
Total Penambahan	Rp 129.592.346.085	
Pengurangan		
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	(Rp114.664.073.676)	
Total Pengurangan	(Rp114.664.073.676)	
Kenaikan / (Penurunan)		Rp 14.928.272.409
Saldo per 31 Desember 2012, Akhir		Rp 47.087.227.489

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 per Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Wilayah

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	29.827.344.616	29.680.159.096	147.185.520
2	DKI Jakarta	398.900.000	0	398.900.000
3	Jawa Timur	49.500.000	0	49.500.000
4	Sumatera Utara	401.786.000	0	401.786.000
5	Riau	0	696.903.484	(696.903.484)
6	Kalimantan Selatan	423.783.600	0	423.783.600
7	Sulawesi Tengah	69.282.000	0	69.282.000
8	Sulawesi Selatan	640.202.500	90.000.000	550.202.500
9	Sulawesi Tenggara	360.415.000	0	360.415.000
10	Bali	197.723.400	55.085.000	142.638.400
11	Nusa Tenggara Barat	0	1.044.547.500	(1.044.547.500)
12	Nusa Tenggara Timur	9.414.495.800	238.720.000	9.175.775.800
13	Papua	4.974.459.573	73.800.000	4.900.659.573
14	Maluku Utara	279.740.000	279.740.000	0
15	Bangka Belitung	49.595.000	0	49.595.000
Jumlah		47.087.227.489	32.158.955.080	14.928.272.409

C.1.3 Piutang Jangka Panjang

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Rp25.907.973

C.1.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 adalah Rp25.907.973 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp149.631.949. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo ini merupakan Tagihan TP/TGR yang belum dilimpahkan ke KPKNL dan pelunasannya di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah tanggal pelaporan.

Sebagaimana pada akun Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR, maka penerapan penyisihan piutang tidak tertagih juga terjadi pada akun Tagihan TP/TGR. Hal ini disebabkan Tagihan TP/TGR merupakan akun Piutang yang bersifat jangka panjang.

Daftar saldo Tagihan TP/TGR per-Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Tagihan TP/TGR Per Wilayah

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	25.907.973	149.631.949	(123.723.976)
Jumlah		25.907.973	149.631.949	(123.723.976)

Adapun mutasi Tagihan TP/TGR pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011, Awal		Rp 149.631.949
Mutasi Tambah:		
Pemutusan Ikatan Dinas/Tugas Belajar	Rp 10.322.512	
Kehilangan/Kecurian Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	Rp 1.764.628	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 12.087.140	
Mutasi Kurang:		
Pemutusan Ikatan Dinas/Tugas Belajar	(Rp 82.818.498)	
Kehilangan/Kecurian Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	(Rp 41.084.919)	
Kehilangan/Kecurian Barang Inventaris Kantor	(Rp 5.657.699)	
Pengunduran Diri CPNS	(Rp 6.250.000)	
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp 135.811.116)	
Kenaikan / (Penurunan)		(Rp123.723.976)
Saldo per 31 Desember 2012, Akhir		Rp 25.907.973

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah yang sebesar Rp10.322.512 berasal dari tagihan TP/TGR yang timbul sebagai akibat pemutusan Ikatan Dinas/Tugas Belajar pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pusat Statistik (BPS) yang terjadi selama tahun 2012 untuk sejumlah 2 orang.
- Mutasi tambah yang sebesar Rp1.764.628 berasal dari tagihan TP/TGR yang timbul sebagai akibat adanya kehilangan/kecurian kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dikenakan pada 1 orang.
- Mutasi kurang yang sebesar Rp82.818.498 merupakan hasil pelunasan tagihan TP/TGR yang dilakukan PNS BPS atas dikenakannya pemutusan Ikatan Dinas/Tugas Belajar yang terjadi selama tahun 2012 untuk sejumlah 7 orang.
- Mutasi kurang yang sebesar Rp41.084.919 merupakan hasil pelunasan tagihan TP/TGR berupa ganti kerugian untuk kejadian kehilangan/kecurian kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dikenakan kepada 11 orang.
- Mutasi kurang yang sebesar Rp5.657.699 merupakan hasil pelunasan tagihan TP/TGR berupa ganti kerugian untuk kejadian kehilangan/kecurian barang inventaris kantor yang dikenakan kepada 3 orang.
- Mutasi kurang yang sebesar Rp6.250.000 merupakan hasil pelunasan tagihan TP/TGR berupa denda atas pengunduran diri CPNS yang terjadi selama tahun 2012 untuk sejumlah 1 orang.

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti
Rugi
(Rp4.971.097)

C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar (Rp4.971.097) dan (Rp24.754.534). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing – masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR per-Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR Per Wilayah

Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sestama	Lancar	1.260.000	0,5	6.300
	Kurang Lancar	18.397.973	10	1.839.797
	Diragukan	6.250.000	50	3.125.000
Jumlah		25.907.973		4.971.097

C.1.4 Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud
Rp179.365.871.843

C.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 adalah Rp179.365.871.843 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp Rp62.265.274.936. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Adapun Aset Tak Berwujud yang dimiliki BPS adalah berupa:

1. Software sebesar Rp172.868.207.642
2. Lisensi sebesar Rp6.497.664.201

Sampai dengan 31 Desember 2012 terjadi mutasi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp117.100.596.907. Mutasi perubahan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Aset Lainnya Aset Tak Berwujud

Saldo per 31 Desember 2011, Awal		Rp 62.265.274.936
Penambahan		
Penambahan Saldo Awal	Rp	4.691.000
Pembelian	Rp	118.058.101.567
Transfer Masuk	Rp	38.192.663.590
Total Penambahan	Rp	156.255.456.157
Pengurangan		
Transfer Keluar	(Rp)	39.149.660.250
Penghapusan	(Rp)	3.835.000

Penghentian Aset Dari Penggunaan	(Rp 1.364.000)	
Total Pengurangan	(Rp 39.154.859.250)	
Kenaikan / (Penurunan)		Rp 117.100.596.907
Saldo per 31 Desember 2012, Akhir		Rp 179.365.871.843

Aset Lain-Lain
Rp33.486.652.486

C.1.4.2 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 adalah Rp33.486.652.486 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp35.205.833.268. Pos Aset Lain-Lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Nilai Aset Lain-lain tersebut diperoleh dari Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset.

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2011 menjadi saldo awal tahun 2012 sebesar Rp35.205.833.268 merupakan nilai saldo Aset Lain-Lain yang berasal dari Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional sebesar Rp17.633.368.994 dan yang berasal dari saldo Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sebesar Rp17.572.464.274. Saldo Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tersebut terdiri dari nilai TP/TGR yang dilimpahkan penagihannya ke KPKNL sebesar Rp13.002.970.571 dan TP/TGR yang masih dalam proses penetapan sebesar Rp4.569.493.703. Nilai Aset Lain-Lain yang berasal dari TP/TGR tersebut pada tahun 2012 telah direklasifikasi sebagai Aset Lancar pada akun Bagian Lancar TP/TGR.

Mutasi perubahan nilai Aset Lain – Lain yang merupakan Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011, Awal		Rp 17.633.368.994
Penambahan		
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 51.229.122.269	
Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan	Rp 8.024.000	
Penghapusan	Rp 109.682	
Koreksi Pencatatan	Rp 6.279.023	
Total Penambahan	Rp 51.243.534.974	
Pengurangan		
Penghapusan	(Rp 13.442.476.143)	
Transfer keluar	(Rp 11.048.000)	
Reklasifikasi Keluar	(Rp 42.769.296)	
Koreksi Pencatatan	(Rp 33.066.000)	
Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan	(Rp 21.860.892.043)	
Total Pengurangan	(Rp 35.390.251.482)	
Kenaikan / (Penurunan)		Rp 15.853.283.492
Saldo per 31 Desember 2012, Akhir		Rp 33.486.652.486

Rincian Aset Tetap yang telah dihentikan penggunaannya pada BPS per 31 Desember 2012 berdasarkan golongan barang adalah sebagai berikut:

1. Tanah	Rp	59.431.000
2. Peralatan dan Mesin	Rp	29.891.821.503
3. Gedung dan Bangunan	Rp	3.125.092.800
4. Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	94.292.910

5.	Aset Tetap Lainnya	Rp	314.650.273
6.	Aset Tak Berwujud	Rp	1.364.000
	Jumlah	Rp	33.486.652.486

C.2 KEWAJIBAN

C.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kpd pihak
ketiga
Rp3.721.781.542

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp3.721.781.542 dan Rp2.774.401.823. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga ini mengungkapkan kewajiban pemerintah yang masih harus diakui karena telah diterimanya hak dari pihak ketiga yang terjadi pada saat tanggal neraca.

Daftar Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 per Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Wilayah

No.	Kode	Uraian	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0199	Sestama	678.557.700	0	0
2	0200	Jawa Barat	14.591.148	30.641.704	0
3	0300	Jawa Tengah	84.732.350	69.448.194	30.420.000
4	0400	DI Yogyakarta	1.171.886	3.003.104	0
5	0500	Jawa Timur	90.748.565	116.072.339	0
6	0600	Aceh	41.176.784	5.398.422	0
7	0700	Sumatera Utara	72.469.464	55.713.636	0
8	0800	Sumatera Barat	9.527.204	1.060.582	0
9	0900	Riau	6.208.417	2.398.233	0
10	1000	Jambi	33.069.678	3.637.000	0
11	1100	Sumatera Selatan	40.194.204	1.833.040	0
12	1200	Lampung	27.117.862	40.975.238	0
13	1300	Kalimantan Barat	47.342.312	5.443.914	0
14	1400	Kalimantan Tengah	0	23.003.340	0
15	1500	Kalimantan Selatan	23.689.256	19.328.156	0
16	1600	Kalimantan Timur	18.848.694	14.083.411	0
17	1700	Sulawesi Utara	84.675.221	29.830.554	0
18	1800	Sulawesi Tengah	26.974.589	13.154.646	0
19	1900	Sulawesi Selatan	952.293.265	66.546.430	0
20	2000	Sulawesi Tenggara	34.417.517	11.681.464	0
21	2100	Maluku	0	32.054.910	0
22	2200	Bali	22.609.295	31.113.106	0
23	2300	Nusa Tenggara Barat	34.772.031	3.284.201	0
24	2400	Nusa Tenggara Timur	24.541.368	1.007.500	0
25	2600	Bengkulu	556.902.059	8.901.461	0
26	2800	Maluku Utara	36.383.169	2.964.800	0
27	2900	Banten	2.741.155	21.242.365	0
28	3000	Bangka Belitung	2.432.772	0	0
29	3100	Gorontalo	11.897.619	3.868.634	0
30	3200	Kepulauan Riau	31.138.650	19.599.499	0
31	3400	Sulawesi Barat	18.978.269	23.869.156	0
		Jumlah	3.030.202.503	661.159.039	30.420.000

Uang Muka Dari
KPPN
Rp240.116.614

C.2.1.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KUN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp240.116.614 dan Rp986.006.527. Uang Muka dari KUN merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp371.467.063

C.2.1.3 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp371.467.063 dan Rp4.844.489.993. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetorkan ke Kas Negara.

C.3 EKUITAS DANA

C.3.1 Ekuitas Dana Lancar

Cadangan Piutang
Rp350.807.958

C.3.1.1 Cadangan Piutang

Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp350.807.958 dan Rp448.247.975. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.

Daftar Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 per Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 41
Rincian Cadangan Piutang Per Wilayah

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	336.660.460	440.270.521	(103.610.061)
2	Jawa Tengah	673.217	0	673.217
3	Sumatera Barat	4.238.700	0	4.238.700
4	Kalimantan Barat	6.232.531	1.452.700	4.779.831
5	Kalimantan Timur	1.463.725	3.831.745	(2.368.020)
6	Papua	0	735.683	(735.683)
7	Maluku Utara	1.539.325	1.957.326	(418.001)
Jumlah		350.807.958	448.247.975	(97.440.017)

Cadangan
Persediaan
Rp18.257.177.113

C.3.1.2 Cadangan Persediaan

Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp18.257.177.113 dan Rp18.293.548.809. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (Rp1.554.466.289)

C.3.1.3 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Saldo Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 adalah sebesar (Rp1.554.466.289) sedangkan per 31 Desember 2011 adalah (Rp2.588.453.080). Akun ini merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Lancar Lainnya Rp447.485.755

C.3.1.4 Ekuitas Dana lancar Lainnya

Saldo Ekuitas Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp447.485.755 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah Rp1.080.253.867. Akun ini merupakan saldo hibah yang masih terdapat pada masing – masing rekening hibah dan jasa giro hibah yang masing – masing sebesar Rp422.798.849 dan Rp24.686.906.

Rincian Saldo Ekuitas Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2012 per Wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Ekuitas Dana Lancar Lainnya Per Wilayah

No.	Wilayah	31-Des-12 (Rp)	31-Des-11 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sestama	447.485.755	1.080.253.867	(632.768.112)
Jumlah		447.485.755	1.080.253.867	(632.768.112)

Barang/Jasa Yang Harus Diterima Rp322.971.666

C.3.1.5 Barang/Jasa Yang Harus Diterima

Saldo Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp322.971.666 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah Rp476.950.889. Akun ini merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diberikan oleh pihak lain.

C.3.2 Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp2.744.090.977.197

C.3.2.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp2.744.090.977.197 dan Rp2.476.962.548.621. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp212.873.461.205

C.3.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp212.873.461.205 dan Rp97.595.985.619. Akun ini merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya dan Piutang Jangka Panjang.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Daftar temuan dan monitoring penyelesaian tindak lanjut dilampirkan sebagaimana format terlampir.

D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

D.3 REKENING BPS

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan kerja Pasal 9 ayat 2, bahwa setiap satuan kerja wajib melaporkan pengelolaan rekening setiap semester. Melalui surat Badan Pusat Statistik Nomor 02220.011 Tanggal 18 Januari 2013 perihal Daftar Rekening BPS Provinsi Semester II Tahun Anggaran 2012, Bagian Perbendaharaan BPS dalam hal ini meminta laporan pengelolaan rekening akhir tahun kepada seluruh satuan kerjanya baik pusat maupun daerah.

Seluruh rekening milik BPS yang dipertahankan pada semester II tahun anggaran 2012 sebanyak 549 rekening aktif dan 29 rekening ditutup dari 507 satker (terlampir) yang dirinci sebagai berikut:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran sebanyak 507 buah.
2. Rekening Bendaharan Penerimaan sebanyak 24 buah.
3. Rekening Lainnya (Hibah) sebanyak 5 buah.
4. Rekening Lainnya (Swakelola) sebanyak 13 buah.
5. Rekening ditutup sebanyak 29 buah.

Dari rekening Hibah diatas ada 1 rekening milik BPS Provinsi Banten yang telah disetujui Pembukaan Rekeningnya oleh Kementerian Keuangan dengan Nomor Registrasi 71664001.

D.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada tahun 2012 BPS terdapat penambahan satker sebanyak 23 (dua puluh tiga) satker, yang sebelumnya berjumlah 484 satker, rincian satker baru sebagai berikut:

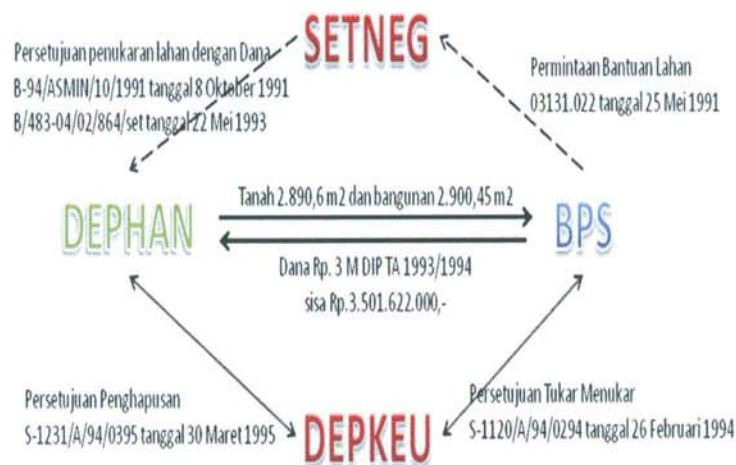
Tabel 43
Rincian Satker Baru Selama TA 2012

No.	Kode Satker	Nama Satker	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	689181	BPS Kota Subulussalam	Aceh
2	689114	BPS Kota Gunung Sitoli	Sumatera Utara
3	682321	BPS Kabupaten Batu Bara	Sumatera Utara
4	682431	BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	Riau
5	689160	BPS Kota Sungai Penuh	Jambi
6	689156	BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat	Lampung
7	682410	BPS Kabupaten Pringsewu	Lampung
8	689198	BPS Kabupaten Kayong Utara	Kalimantan Barat
9	682359	BPS Kabupaten Tana Tidung	Kalimantan Timur
10	689135	BPS Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	Sulawesi Utara
11	682317	BPS Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara
12	682370	BPS Kab Sigi	Sulawesi Tengah
13	682384	BPS Kabupaten Toraja Utara	Sulawesi Selatan
14	689177	BPS Kabupaten Buton Utara	Sulawesi Tenggara
15	682338	BPS Kabupaten Konawe Utara	Sulawesi Tenggara
16	682391	BPS Kabupaten Maluku Barat Daya	Maluku
17	668711	BPS Kabupaten Buru Selatan	Maluku
18	682363	BPS Kabupaten Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat
19	689121	BPS Kabupaten Nagekeo	Nusa Tenggara Timur
20	682342	BPS Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur
21	689142	BPS Kabupaten Bengkulu Tengah	Bengkulu
22	682427	BPS Kota Tangerang Selatan	Banten
23	682406	BPS Kabupaten Kepulauan Anambas	Kepulauan Riau

2. Nilai Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Tanah pada Neraca BPS per 31 Desember 2012 sebesar Rp607.568.536.649 dengan luas 967.914 m². Jumlah Tanah tersebut yang telah bersertifikat dengan nama pemegang hak Badan Pusat Statistik (BPS) senilai Rp519.616.323.519 dengan luas 796.789 m² dan belum bersertifikat dengan nama pemegang hak BPS (belum bersertifikat) senilai Rp87.952.213.130 seluas 171.125 m². Rincian data tanah BMN tahun 2012 terlampir. Untuk tanah yang belum bersertifikat upaya pensertifikatannya secara bertahap akan dilakukan *on top* Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan untuk tanah yang belum masuk rencana sertifikasi *on top* BPN, BPS tetap akan memproses pensertifikatannya.
3. Terdapat permasalahan pada Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Tanah pada Badan Pusat Statistik, yaitu:
 - a. Sengketa yang terdiri dari 2 bidang tanah dengan luas total 360 m² dan bernilai Rp141.120.000, sedangkan rinciannya adalah:
 - i. BPS Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dengan luas tanah 160 m² senilai Rp101.120.000.
 - ii. BPS Provinsi Sumatera Barat (Sumatera Barat) dengan luas tanah 200 m² senilai Rp40.000.000.
 - b. Tanah yang tidak terdapat bukti kepemilikan terdiri dari 13 bidang tanah dengan luas total 11.458 m² dan bernilai Rp7.358.514.000, sedangkan rinciannya adalah:
 - i. BPS Provinsi DKI Jakarta (DKI Jakarta) dengan luas tanah 348 m² senilai Rp1.566.000.000.
 - ii. BPS Provinsi Jawa Timur (Jawa Timur) yang terdiri dari 2 bidang tanah yang masing – masing dengan luas 200 m² dan 920 m² senilai masing – masing Rp319.305.000 dan Rp2.300.000.000.

- iii. BPS Kota Binjai (Sumatera Utara) dengan luas tanah 1.549 m² senilai Rp717.187.000.
- iv. BPS Provinsi Lampung (Lampung) dengan luas tanah 450 m² senilai Rp256.500.000.
- v. BPS Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah) dengan luas tanah 1.140 m² senilai Rp188.100.000.
- vi. BPS Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) yang terdiri dari 3 bidang tanah yang masing – masing dengan luas 431 m², 440 m², dan 200 m² senilai masing – masing Rp668.050.000, Rp457.600.000, dan Rp457.600.000.
- vii. BPS Kabupaten Puncak Jaya (Papua) dengan luas tanah 1.980 m² senilai Rp37.500.000.
- viii. BPS Kabupaten Sarmi (Papua) dengan luas tanah 1.000 m² senilai Rp150.000.000.
- ix. BPS Kabupaten Bintang (Papua) dengan luas tanah 2.500 m² senilai Rp200.000.000.
- x. BPS Kabupaten Gorontalo (Gorontalo) dengan luas tanah 300 m² senilai Rp40.672.000.
- c. Tanah yang dikuasai oleh pihak lain terdiri dari 9 bidang tanah dengan luas total 3.141 m² dan bernilai Rp1.183.769.303, sedangkan rinciannya adalah:
 - i. BPS Kabupaten Aceh Utara (Aceh) dengan luas tanah 300 m² senilai Rp187.721.000.
 - ii. BPS Kota Metro (Lampung) dengan luas tanah 291 m² senilai Rp382.083.000.
 - iii. BPS Provinsi Papua (Papua) yang terdiri dari 5 bidang tanah yaitu:
 1. Luas tanah 150 m² dengan nilai Rp11.000.000.
 2. Luas tanah 150 m² dengan nilai Rp13.700.000.
 3. Luas tanah 150 m² dengan nilai Rp17.100.000.
 4. Luas tanah 200 m² dengan nilai Rp18.200.000.
 5. Luas tanah 150 m² dengan nilai Rp39.300.000.
 - iv. BPS Kabupaten Gorontalo (Gorontalo) dengan luas tanah 750 m² senilai Rp64.976.303.
 - v. BPS Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat) dengan luas tanah 1.000 m² senilai Rp449.689.000.
4. Dalam upaya tertib administrasi Barang Milik Negara di BPS, telah dibentuk Tim Penertiban Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan BPS sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 164 Tahun 2012 tanggal 25 Mei 2012.
5. Rincian Penggolongan Kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak BPS Tahun 2012 terlampir.
6. Pengalihan Tanah/Bangunan Kementerian Pertahanan kepada Badan Pusat Statistik.
 - a. Latar Belakang
 - A.1. BPS : Kepala BPS melalui surat nomor 03131.022 tanggal 25 Mei 1991 mengajukan permohonan bantuan perluasan lokasi Kantor BPS dengan mengambil sebagian lokasi Lembaga Biomedis Dinas Kesehatan TNI AD di Jl. Dr. Sutomo No. 6.

- A.2. Sekretariat Negara : Mensesneg melalui surat nomor B-94/ASMIN/10/1991 tanggal 8 Oktober 1991 meminta kepada Kasad agar permohonan BPS tersebut dapat dipenuhi.
- A.3. TNI-AD : Kasad melalui surat nomor B/483-04/02/864/set tanggal 22 Mei 1993 menyatakan bahwa pada prinsipnya tanah dimaksud dapat digunakan untuk perluasan kantor BPS dengan cara tukar menukar (*ruislag*).
- b. Objek Pertukaran:
- B.1. Luas : 2.890,6 m² dengan bangunan seluas 2.900,45 m².
- B.2. Lokasi : Jl. Dr. Sutomo No. 6
- B.3. Nilai : Rp6.501.622.000.
- B.4. Aset pengganti dari BPS berupa dana kompensasi
- i. Tahap Pertama: Rp3.000.000.000 (DIPA 1993/1994)
 - ii. Tahap Kedua : Sisanya (Rp3.501.622.000)
- c. Diagram Alur:



- d. Pelaksanaan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kompensasi atas Pelepasan Aset Departemen Hankam/ABRI c.q TNI-AD/DITKESAD di Jl. Dr. Sutomo No. 6 kepada BPS dan Pesangon Penghuni di Komplek DITKESAD Jl. Dr. Sutomo No. 6 Jakarta Pusat, perjanjian nomor 774/K/PSPS/III/94 yang ditindaklanjuti dengan pemberian dana kompensasi kepada Kepala Kodam Jaya/Jayakarta Kol. Inf. Bachrul dan diserahkannya Naskah Serah Terima Sementara Tanah dan Bangunan TNI AD Jl. Dr. Sutomo No. 6 Jakarta Pusat.
- e. Hasil rapat Tim Peneliti Interdep tanggal 16 Juni 1995 sudah dipenuhi oleh BPS dengan pengajuan melalui Daftar usulan Proyek Prasiik BPS pada Tahun Anggaran 1995/1996 tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari Dirjen Anggaran, demikian pula pengajuan pada Tahun Anggaran 1999/2000.

f. Permasalahan:

1. Proses tukar menukar yang belum selesai ini menjadi salah satu temuan BPK RI mulai 2002 sampai dengan sekarang, terutama terkait dengan permasalahan pencatatan asetnya, yaitu aset sudah dipakai BPS tetapi aset dimaksud masih tercatat di TNI-AD.
2. Sisa dana kompensasi yang menjadi kewajiban BPS sampai sekarang semakin meningkat, dimana pada tahun 1994 sebesar Rp3.501.622.000 sekarang sudah menjadi Rp21.793.438.560 (Surat Kastaf Pangdam Jaya nomor B/1297/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010).

g. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Barang Milik Negara 1 (DJKN-BMN 1) dalam penyelesaian masalah ini melalui surat undangan rapat tanggal 16 September 2010 dari DJKN-BMN 1 nomor Und 101/KN.2/2010 tanggal 11 September 2010. Undangan ditujukan kepada Sestama BPS, Aslog Mabes TNI, Aslog TNI-AD, Aslog Kodam Jaya, Direktur Konstruksi Ditjen Ranahan Dephan, Direktur Anggaran II Ditjen Anggaran, Direktur BMN II, dan Direktur Hukum dan Informasi Depkeu, pembahasan dalam rapat:

1. Berdasarkan KMK 350/KMK.03/1994 maupun KMK 470/KMK.01/1994 bahwa pengalihan aset dari satu Kementerian kepada Kementerian yang lain dilaksanakan dengan mekanisme hibah dan bukan tukar menukar, sehingga tidak akan ada kompensasi/penggantian.
2. Berdasarkan surat persetujuan penghapusan Menteri Keuangan nomor S-1231/A/94/0395 tanggal 30 Maret 1995, aset berupa tanah di Jl. Dr. Sutomo No. 6 Jakarta Pusat tersebut seharusnya sudah dan harus dihapuskan dari Daftar Barang pada TNI-AD untuk selanjutnya dialihkan dan dicatat sebagai aset pada BPS.
3. Terkait permasalahan kompensasi sebagaimana klausul dalam surat Menkeu nomor S-1231/A/94/0395 tanggal 30 Maret 1995, seharusnya diselesaikan dalam koridor/sesuai dengan prosedur pengelolaan anggaran yang berlaku, yang dalam hal ini merupakan bagian tugas pokok dan fungsi dari Ditjen Anggaran.

Kesimpulan rapat seperti tertuang dalam notulen rapat adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelesaian temuan BPK pada Departemen Pertahanan dan BPS perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Departemen Pertahanan agar menyampaikan surat ke Departemen Keuangan c.q Ditjen Kekayaan Negara untuk meneruskan rekomendasi temuan BPK terkait dengan permasalahan aset di jalan Dr.Sutomo No.6 Jakarta Pusat.
 - b. Departemen Keuangan akan menjelaskan kepada BPS tentang penyelesaian pengalihan aset dari Dephan kepada BPS dan penyediaan anggaran untuk aset pengganti.

2. Kekurangan penyediaan dana untuk alokasi aset pengganti Tahap II, agar diajukan oleh Menteri Pertahanan kepada Menteri Keuangan c.q Ditjen Anggaran sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1231/A/94/0395 tanggal 30 Maret 1995, dengan dilengkapi daftar kebutuhan aset sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Menteri Pertahanan segera menghapuskan tanah dan bangunan eks Asrama Ditesad, sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan nomor S-1231/A/94/0395 tanggal 30 Maret 1995, perihal penghapusan tanah dan bangunan eks Asrama Ditkesad.
- h. Dalam pertemuan tersebut pihak Dephan tidak menandatangani notulen rapat yang telah disepakati bersama.
- i. Karena pada rapat terdahulu (16 September 2009) pihak TNI-AD tidak mau menandatangani Notulen Rapat, maka BPS kembali mengajukan permohonan bantuan kepada Kementerian Keuangan melalui surat Sestama Nomor 02520.246 tanggal 18 Juli 2011 perihal permohonan bantuan penyelesaian atas tanah TNI AD di BPS Jl. Dr. Sutomo No. 6 Jakarta.
- j. Menindaklanjuti surat Sestama BPS Nomor 02520.246 tanggal 18 Juli 2011 tersebut kemudian pada tanggal 6 Maret 2012 bertempat di R.Rapat Direktorat BMN Gd. Syaffrudin Prawiranegara Lt. 11 Utara diadakan pertemuan Pembahasan penyelesaian permasalahan tukar menukar tanah dan bangunan eks-asrama angkatan darat di Jalan Sutomo Nomor 6 Jakarta yang dihadiri oleh:
 1. Tim DJKN : Direktur BMN, Direktorat PKNSI, Direktorat Hukum dan Humas, Direktorat Anggaran II.
 2. Tim BPS : Kepala Biro Umum, Kepala Subbagian Penghapusan.
 3. Tim TNI AD : Aslog Kodam Jaya, Aslog Mabes TNI, Aslog Mabes TNI-AD, Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Kesimpulan hasil rapat adalah bahwa atas dasar surat Menkeu Nomor: S-1231/A/94/0395 tanggal 30 Maret 1995, Kementerian Pertahanan akan mengajukan surat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran sehubungan dengan pengalokasian dana untuk aset pengganti Tahap II di luar pagu anggaran TNI c.q. TNI AD (*on top*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kementerian Pertahanan akan bersurat ke Mabes TNI AD agar memerintahkan Kodam Jaya untuk menghitung kebutuhan aset berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan BPS pada saat itu.
2. Setelah mendapatkan rincian kebutuhan aset pengganti (nilai disesuaikan dengan kondisi saat ini) dari Kodam Jaya, maka Kementerian Pertahanan akan mengajukan anggaran untuk alokasi aset pengganti tahap II di luar pagu anggaran TNI AD (*on top*) kepada Menteri Keuangan.
3. Direktorat Anggaran (Direktorat Anggaran II yang membawahi BPS dan Direktorat Anggaran III yang membawahi Kementerian Pertahanan) akan

- saling berkoordinasi untuk mengawal ketersediaan dan penempatan anggarannya sesuai kesepakatan rapat (*on top*).
4. Selanjutnya setelah anggaran disetujui dan tersedia (diperkirakan TA 2014) maka Kementerian Pertahanan akan melakukan penyerahan bukti-bukti kepemilikan atas aset di Jl Dr. Sutomo No. 6 kepada BPS dan menghapuskannya secara administrasi dalam SIMAK BMN Kementerian Pertahanan.
 - k. Dalam pertemuan tersebut pihak Kementerian Pertahanan setuju menandatangani notulen rapat yang telah disepakati bersama.
-

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc.

NIP. 19560805 197903 1 001